

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
WISATA AIR TERJUN SETATAH DI DESA BATEALIT JEPARA**

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Sosiologi



Oleh
Fiqkri Maulana Dwiyanto
1906026158

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp, : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fiqkri Maulana Dwiyanto

NIM : 1906026158

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA
AIR TERJUN SETATAH DI DESA BATEALIT JEPARA

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I
Bidang Substansi Materi

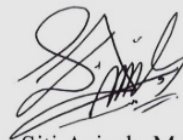


Kaiser Atmaja, M.A

NIP. 198207132016011901

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing II
Bidang Metodologi dan Penulisan



Siti Azizah, M.Si

NIP. 199206232019032016

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
WISATA AIR TERJUN SETATAH DI DESA BATEALIT JEPARA**

Disusun Oleh:

Fiqkri Maulana Dwiyanto

(1906026158)

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi pada hari/tanggal Senin, 23 Juni 2025
dan dinyatakan **LULUS**.

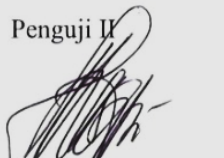
Susunan dewan penguji:


Ketua Sidang
Kaisar Atmaja, M.A.
NIP. 198207132016011901

Penguji I


Drs. Ghuftron Ajib, M.Ag.
NIP. 196603251992031001

Penguji II


Nur Hasyim, M.A.
NIDN. 2023037303

Dosen Pembimbing I


Kaisar Atmaja, M.A
NIP. 198207132016011901

Dosen Pembimbing II


Siti Azizah, M.Si
NIP. 199206232019032016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya dalam skripsi ini adalah asli buatan saya dan belum pernah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar di Lembaga Pendidikan lain. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil publikasi maupun tidak dipublikasi dan dibahas dalam teks ini telah dicantumkan sumbernya dalam daftar Pustaka.

Semarang, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan



Fiqri Maulana Dwiyanto

NIM: 1906026158

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji syukur atas izin Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi sekaligus penelitian yang diperuntukan skripsi ini. Tiada habisnya peneliti bersyukur atas kesempatan yang sudah diberikan oleh-Nya karena tanpa-Nya penulis tidak mungkin mencapai titik ini. Kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. karena berkat Baginda penulis mengerti Islam dan mendorong untuk menjadi seorang muslim yang kaffah di dunia maupun akhirat.

Skripsi dengan judul *“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH DI DESA BATEALIT JEPARA”*, dapat terselesaikan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) di Prodi Sosiologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama pembuatan tulisan ini penulis telah menerima berbagai bantuan, dorongan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Naili Ni'matun Illiyun, M.A. selaku kepala jurusan sosiologi.
4. Bapak Kaisar Atmaja, M.A. selaku pembimbing 1 yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan kesabaran penuh dari awal studi hingga akhir.
5. Ibu Siti Azizah M.Si. selaku pembimbing 2 yang telah bersedia membantu dan membimbing penulis dengan kesabaran penuh dari awal studi hingga akhir.
6. Bapak Endang Supriadi, M.A. selaku dosen wali yang senantiasa membantu dan memberikan nasehat selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staff FISIP yang telah memberikan penulis berbagai macam ilmu pengetahuan selama studi.
8. Bapak Ahmad Tukul dan pengelola wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

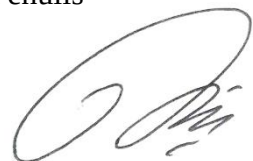
9. Para informan yang bersedia untuk diwawancara dalam penelitian ini.
10. Orangtua penulis Bapak Jamil dan Ibu Siti Arofah yang tidak pernah satu haripun berhenti mendukung penulis untuk menyelesaikan edukasinya, serta selalu bersabar dengan penulis meski mengalami keterlambatan.
11. Kakakku Ahmad Ulul Firdha yang menjadi motivasi penulis untuk mencapai kesuksesan.
12. Seluruh anggota bani Rusdi dan Sutarjo yang telah memberikan penulis kondisi keluarga yang hangat.
13. Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Ardhi Krisnawan selaku sahabat penulis yang rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis di kala kesulitan.
14. Teman-teman dari kelas SOS-E (KISOS) yang menemani semasa perkuliahan dan telah memberikan sejuta warna bagi penulis selama di bangku perkuliahan
15. Teman-teman seperjuangan sosiologi UIN Walisongo tahun 2019
16. Teman-teman KKN MIT 73 Desa Ngawensari, Kabupaten Kendal, yang telah memberikan sejuta warna bagi penulis selama masa kuliah kerja nyata.
17. Segenap keluarga dan semua orang yang sudah memberi dukungan dan dorongan yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Penulisan skripsi ini merupakan proses panjang yang penuh tantangan, namun akhirnya dapat diselesaikan berkat dukungan banyak pihak. Penulis hanya dapat membalas kebaikan mereka dengan doa agar senantiasa diberi kelancaran, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga mengharapkan kritik, saran, dan masukan demi perbaikan dan pengelolaan di masa depan. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis



Fiqkri Maulana Dwiyanto

NIM: 1906026158

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada
Kedua orangtua tercinta Bapak Jamil dan Ibu Siti Arofah yang sudah memberikan
segala sesuatu untuk penulis sehingga mampu mengantarkan
penulis untuk sampai ke momen ini.

Almamater kebanggaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

“Kekuatan pembangunan terletak bukan pada tangan yang berkuasa,
tetapi pada masyarakat yang diberdayakan.”

Terinspirasi dari teori Sherry Arnstein (1969)

A Ladder of Citizen Participation

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah dikelola secara swadaya oleh warga RT 10/RW 02 tanpa intervensi langsung dari pemerintah maupun pihak swasta, menjadikannya contoh nyata wisata berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit Jepara.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan wisata. Analisis data dilakukan melalui dengan tahap data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis dengan perspektif teori partisipasi Sherry Arnstein.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam aspek fisik seperti kerja bakti, pembangunan akses jalan, fasilitas wisata, serta pengelolaan kebersihan dan parkir. Selain itu, warga juga aktif dalam perkumpulan musyawarah RT dan pengambilan keputusan terbatas. partisipasi tersebut sebagian besar masih berada pada level *tokenisme*, karena dominasi keputusan masih dipegang oleh figur tertentu seperti ketua RT. Secara sosial, keikutsertaan warga berdampak pada meningkatnya keterbukaan terhadap pendatang, tumbuhnya kebersamaan, dan revitalisasi nilai gotong royong. Secara ekonomi, pengelolaan wisata menciptakan peluang kerja baru di luar sektor pertanian, seperti pedagang makanan, pengelola parkir, dan pelaku usaha kecil. Dari perspektif Islam, kegiatan ini mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan) dan ukhuwah sosial. Pengelolaan wisata Air Terjun Setatah memperkuat pemberdayaan lokal, namun perlu penguatan kapasitas dan distribusi kekuasaan agar partisipasi masyarakat mencapai bentuk yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Wisata, Air Terjun Setatah, Desa Batealit

ABSTRACT

Community participation in the development of Setatah Waterfall tourism is managed independently by residents of RT 10/RW 02 without direct intervention from the government or the private sector, making it a real example of community-based tourism. This study aims to determine community participation and the impact of community participation in the development of Setatah Waterfall tourism in Batealit Village, Jepara.

The study used a qualitative method and the type of field research was field research with a descriptive approach. Data collection techniques in the form of observation, semi-structured interviews, and documentation of informants who were directly involved in tourism management. Data analysis was carried out through the stages of data that had been collected and analyzed with the perspective of Sherry Arnstein's participation theory.

The results of the study showed that community participation was very high in physical aspects such as community service, construction of road access, tourism facilities, and management of cleanliness and parking. In addition, residents are also active in RT deliberation groups and limited decision-making. Most of this participation is still at the tokenism level, because the dominance of decisions is still held by certain figures such as the RT head. Socially, community participation has an impact on increasing openness to newcomers, growing togetherness, and revitalizing the value of mutual cooperation. Economically, tourism development creates new job opportunities outside the agricultural sector, such as food vendors, parking managers, and small business actors. From an Islamic perspective, this activity reflects the values of ta'awun (helping each other in goodness) and social ukhuwah. The development of Setatah Waterfall tourism strengthens local empowerment, but it is necessary to strengthen the capacity and distribution of power so that community participation reaches a more democratic and sustainable form.

Keywords: *Community Participation, Tourism Development, Setatah Waterfall, Batealit Village*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGELOLAAN WISATA, DAN TEORI PARTISIPASI SOSIAL SHERRY ARNSTEIN	20
A. Definisi Konseptual	20
1. Partisipasi Masyarakat	20
2. Pengelolaan Wisata	21
B. Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein	22
1. Konsep Umum Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein	22
2. Asumsi Dasar Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein	23
3. Konsep Kunci Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein	23
C. Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Islam	25

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BATEALIT JEPARA.....	29
A. Kondisi Geografis Desa Batealit	29
1. Letak Geografis Kecamatan dan Desa Batealit, Kabupaten Jepara	29
2. Batas Wilayah Desa Batealit	30
B. Kondisi Demografis Desa Batealit	31
1. Demografi Kecamatan Batealit	31
2. Jumlah dan Komposisi Penduduk.....	31
3. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	32
4. Mata Pencaharian dan Fasilitas Umum	33
5. Potensi Wisata Alam.....	33
C. Sejarah Desa Batealit	35
D. Sejarah Air Terjun Setatah	37
BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH.....	40
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah.....	42
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah.....	50
C. Peran Kelompok Sosial dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah	57
BAB V DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH.....	66
A. Dampak Sosial Partisipasi Masyarakat Desa Batealit dalam Pengelolaan Wisata...	66
B. Dampak Ekonomi dari Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata	71
C. Dampak Partisipasi terhadap Kemandirian Masyarakat Desa Batealit	76
BAB VI KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan.....	17
Tabel 2 Tingkat Usia Penduduk Kecamatan Batealit.....	32
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Batealit.....	32
Tabel 4 Objek Wisata Alam di Kecamatan Batealit	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Air Terjun Setatah	2
Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	29
Gambar 3 Peta Wilayah Kecamatan Batealit.....	30
Gambar 4 Desa Batealit	36
Gambar 5 Wisata Air Terjun Setatah	37
Gambar 6 Gotong Royong Warga	43
Gambar 7 Toilet Pengunjung	44
Gambar 8 Papan Arah Air Terjun Setatah.....	45
Gambar 9 Perkumpulan RT Desa Batealit	47
Gambar 10 Pembangunan Jalan Cor	51
Gambar 11 Pemuda Desa Gotong Royong Di Air Terjun Setatah	51
Gambar 12 Musyawarah RT 10 RW 02 Batealit	53
Gambar 13 Pencatatan Kas RT Desa	55
Gambar 14 Pemuda Desa Menjaga Motor Pengunjung.....	59
Gambar 15 Wawancara Dengan Pedagang di Air Terjun Setatah	61
Gambar 16 Pedagang di Area Wisata Air terjun Setatah	72
Gambar 17 Area Parkir Air Terjun Setatah	73

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian.....	85
Foto Kegiatan.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok lokal dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama yang mendorong rasa kepemilikan serta tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pembangunan tersebut (Sumarto, 2005). Dalam konteks pengelolaan pariwisata, keterlibatan masyarakat di setiap tahapan menjadi penting karena mampu meningkatkan pemahaman lokal, memperkuat rasa memiliki, serta mendorong keberlanjutan destinasi wisata yang dikelola. Ketika masyarakat turut serta dalam perencanaan dan pengelolaan, maka hasil pembangunan wisata cenderung lebih efektif dan berdampak jangka panjang (Wibowo dan Bella, 2023).

Beberapa Penelitian sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam kesuksesan pengelolaan pariwisata. Putranto, (2020) menekankan bahwa berbagai bentuk keterlibatan warga menjadi dasar terbentuknya keterlibatan sosial dan pencapaian tujuan bersama dalam pembangunan wisata. Sementara itu, Cahya dkk., (2017) juga menyatakan bahwa dampak positif dari partisipasi masyarakat terlihat nyata dalam peningkatan pendapatan serta kesejahteraan warga sekitar destinasi wisata.

Desa Batealit yang terletak sekitar 15 kilometer dari Kota Jepara di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan Bangsri. Sebelah selatan Berbatasan dengan kecamatan Mayong, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Pecangaan. Pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tahunan. Desa Batealit memiliki potensi wisata alam yang signifikan, salah satunya adalah air terjun Setatah yang menjadi daya tarik utama wisata desa. Air terjun ini menawarkan keindahan alam yang masih alami, dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan yang hijau, sehingga menciptakan suasana sejuk dan asri. Selain keindahan alamnya, pengelolaan air terjun Setatah dilakukan secara mandiri oleh warga RT 10/RW 02, yang menjadikannya sebagai model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

Potensi wisata ini tidak hanya memberi dampak pada sektor pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat partisipasi sosial di antara warga.

Gambar 1 Air Terjun Setatah



Sumber: *Dokumentasi dari peneliti*

Air terjun Setatah, dibuka pada tahun 2019 di Desa Batealit, Kabupaten Jepara, dikelola oleh warga RT 10/RW 02. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pemandangan alam, air terjun ini menawarkan suasana yang damai. Pengunjung dapat mencapai lokasi dengan berjalan kaki sekitar lima belas menit menyusuri jalan setapak sempit di antara hamparan sawah. Meskipun infrastrukturnya terbatas, air terjun Setatah tetap menjadi tujuan wisata yang indah dan masih alami.

Pemilihan lokasi penelitian di Air Terjun Setatah, Desa Batealit, dilatarbelakangi oleh keunikan model pengelolaan yang dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat lokal secara swadaya sejak tahun 2019. Tidak adanya sokongan langsung dari pemerintah desa maupun keterlibatan pihak swasta menjadikan kawasan ini sebagai contoh konkret dari pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Keterlibatan aktif warga RT 10/RW 02, mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur, hingga operasional pengelolaan, mencerminkan bentuk partisipasi lokal yang otentik dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga menjadi simbol dari semangat gotong royong dan pemberdayaan komunitas desa, sehingga memberikan ruang yang ideal bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dinamika sosial, bentuk partisipasi, dan dampak sosial-ekonomi yang muncul dari keterlibatan warga dalam pengelolaan wisata

Kondisi ini menjadi salah satu fakta sosial yang menarik untuk diteliti, karena pengelolaan destinasi wisata dilakukan secara mandiri berdasarkan keterlibatan aktif masyarakat RT 10/RW 02 dalam merencanakan dan mengelola destinasi tersebut tanpa

intervensi langsung dari pemerintah desa maupun sokongan modal dari pihak swasta. Masyarakat lokal berinisiatif untuk mengembangkan wisata ini dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi warga. Bentuk partisipasi mereka diwujudkan melalui kerja bakti rutin, musyawarah RT, keterlibatan aktif pemuda sekitar melalui pemuda desa hingga pembangunan fasilitas dasar wisata seperti akses jalan, warung makan, toilet umum, dan area parkir. Hal tersebut, mencerminkan nilai-nilai partisipasi sosial dan semangat gotong royong yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial pedesaan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan penulis dengan Bapak Ahmad Tukul selaku ketua RT 10/RW 02 di peroleh bahwa *Pertama*, didaerah sekitar terdapat sebuah belik. Dari sisi bahasa dan budaya, belik mengacu pada sumber mata air alami yang dulunya menjadi lokasi utama bagi warga desa untuk memperoleh air minum. Sebelum tersedianya sumur atau fasilitas air bersih, masyarakat menggantungkan hidupnya pada belik ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di area Air Terjun Setatah, belik tersebut terletak di bagian hulu aliran air terjun dan dikelilingi oleh batu-batu besar bahkan salah satunya disebut-sebut seukuran truk. Aliran air dari belik ini mengalir secara alami menuju bawah dan menghasilkan arus yang kuat hingga membentuk air terjun. Nama "Air Terjun Setatah" berasal dari istilah lokal “ditatahi”, yang berarti diarahkan atau ditata aliran airnya. Penamaan ini muncul secara alami dari interaksi warga dengan lingkungan sekitar dan mencerminkan kearifan lokal yang tumbuh bersama waktu. Dahulu, masyarakat menggunakan belik ini secara intensif sebagai sumber utama air minum. Mereka mengambil air dengan cara tradisional, menggunakan buyung wadah dari tanah liat yang kemudian dipanggul ke rumah masing-masing. Aktivitas ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga selama bertahun-tahun, bahkan sejak sebelum generasi sekarang lahir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan sumber air tersebut sudah ada sejak lama dan menjadi bagian penting dalam sistem sosial dan ekologi desa. *Kedua*, pengelola wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, Kabupaten Jepara, pengelolaan objek wisata ini melibatkan peran serta aktif masyarakat setempat, khususnya warga RT 10/RW 02 Desa Batealit. *Ketiga*, Secara segi sosial, masyarakat yang sebelumnya tertutup dan kurang terbuka terhadap pendatang, kini menjadi lebih ramah dan terbiasa berinteraksi dengan pendatang dari berbagai daerah. *Keempat*, Sebelumnya masyarakat bergantung pada pertanian dan hasil bumi, kini masyarakat memperoleh peluang kerja baru melalui

kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata seperti mengelola lahan parkir dan membuka warung makan atau toko kecil di sekitar kawasan wisata

Maka dari itu, partisipasi masyarakat warga RT 10/RW 02 Desa Batealit memberikan dampak terhadap masyarakat itu sendiri yaitu mempererat ikatan sosial, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan wisata air terjun Setatah sangat didukung oleh peran serta dan komitmen aktif warga RT10/RW 02 Desa Batealit. Keterlibatan mereka melalui kegiatan bakti sosial dan gotong royong difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana seperti akses jalan, toilet umum, area parkir, dan tempat sampah. Selain itu, Warga RT 10/RW 02 Desa Batealit mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan sejak dibukanya wisata air terjun Setatah. Secara sosial, masyarakat menjadi lebih terbuka dan ramah terhadap pengunjung, bergeser dari sikap mereka yang sebelumnya tertutup. Secara ekonomi, muncul peluang kerja baru di luar pertanian tradisional, termasuk peran sebagai juru parkir dan pemilik kios disekitar lokasi wisata. Perkembangan ini telah mendiversifikasi sumber pendapatan warga dan meningkatkan mata pencaharian mereka. Transformasi positif ini menjadi alasan mengapa wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, Jepara, dipilih penulis sebagai fokus penelitian ini. Terlihat bahwa sebagian besar partisipasi masyarakat masih berada pada tataran pelaksanaan fisik, seperti kerja bakti dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis masih relatif terkonsentrasi pada individu-individu tertentu yang memiliki posisi sosial lebih tinggi..

Penelitian yang dilakukan penulis, penting untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat yang terjadi tergolong sebagai partisipasi simbolik (*tokenisme*) atau sudah mencapai tahap partisipasi sejati (*citizen power*), sebagaimana dijelaskan oleh Sherry Arnstein dalam konsep *Ladder of Citizen Participation*. Pendekatan ini akan menilai apakah bentuk partisipasi yang berkembang lebih bersifat mobilisasi, konsultatif, atau deliberatif. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang kualitas partisipasi masyarakat Desa Batealit serta relevansinya terhadap keberlanjutan pengelolaan wisata lokal. Dengan menekankan dimensi partisipasi ini, penelitian juga dapat memberi kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengelolaan model pariwisata berbasis masyarakat di kawasan pedesaan lainnya.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata air terjun Setatah, Desa

Batealit. Penting untuk mempertimbangkan bahwa keterlibatan aktif dan partisipasi dari masyarakat lokal sangatlah penting untuk pembentukan dan pertumbuhan daya tarik wisata di Desa Batealit Kabupaten Jepara, penulis juga harus mengetahui segala dampak yang dialami masyarakat akibat keikutsertaannya dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit Jepara?
2. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat bagi pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit Jepara.
2. Untuk Mengetahui dampak partisipasi masyarakat bagi pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penjelasan masing-masing manfaat disajikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang dengan memperdalam pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, khususnya di air terjun Setatah, Desa Batealit, Kabupaten Jepara.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, Kabupaten Jepara.

c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, khususnya di air terjun Setatah, Desa Batealit, Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata, khususnya mengenai peran serta masyarakat, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan teratur.
- b. Membantu masyarakat pedesaan dalam mengoptimalkan peran serta mereka dalam pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Menjadi acuan bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memetakan hasil-hasil sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian. Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kontribusi ilmiah yang telah ada, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), dan menyusun dasar teoretis yang kuat untuk mendukung argumentasi ilmiah. Penelitian ini mengkaji tema partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, kajian terdahulu yang relevan dikelompokkan ke dalam dua bagian utama yaitu partisipasi masyarakat dan pengelolaan pariwisata.

1. Partisipasi Masyarakat

Berbagai Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pembangunan, khususnya dalam sektor pariwisata. Ira dan Muhammad, (2020) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga, keterampilan, hingga kontribusi materi. Bentuk-bentuk ini mencerminkan sejauh mana masyarakat

terlibat secara aktif dan substantif dalam pembangunan berbasis masyarakat. Selaras dengan itu, Ulum dan Suryani, (2021) menambahkan bahwa motivasi partisipasi dipengaruhi oleh faktor kemauan, kesadaran, dan ketersediaan kesempatan, meskipun masih banyak hambatan yang ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan desa.

Hasil serupa dikemukakan oleh Haris dkk., (2021) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata desa sering kali bersifat mobilisasi, yaitu hanya dilibatkan dalam aspek teknis atau kerja fisik tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan partisipasi sejati sebagaimana digambarkan dalam konsep *A ladder of participation* oleh Arnstein. Lebih lanjut, Penelitian oleh Lestari dan Nugroho, (2022) menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan wisata sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal yang mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif dan inklusif, bukan sekadar simbolik.

2. Pengelolaan Wisata

Penelitian tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat semakin berkembang dalam dekade terakhir. Mangiri dkk., (2020) menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah daerah tetap menjadi faktor dominan dalam proses pembangunan wisata, namun peran masyarakat lokal tidak dapat diabaikan. Dalam Penelitian tersebut, ditemukan bahwa perlibatan masyarakat dalam aspek perencanaan dan promosi berbanding lurus dengan keberhasilan dan keberlanjutan destinasi wisata.

Penelitian lebih baru oleh Angelina dan Rachmawati, (2022) menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila masyarakat lokal terlibat secara proaktif dalam proses perencanaan, identifikasi potensi lokal, hingga evaluasi dampak. Sementara itu, Fahira dkk., (2022) mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung keberhasilan, seperti ketersediaan infrastruktur, promosi digital melalui media sosial, serta kesiapan masyarakat dalam mengelola risiko sosial dan lingkungan yang timbul akibat meningkatnya aktivitas wisata.

Penelitian oleh Azizah dan Rahayu, (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks desa wisata, partisipasi masyarakat bukan hanya dilihat dari aspek kuantitatif (jumlah orang yang terlibat), tetapi juga dari aspek kualitas pengambilan keputusan. Ketika

masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik, pembangunan cenderung tidak berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan kajian literatur di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sangat dipengaruhi oleh dimensi kesadaran, kepemimpinan lokal, akses terhadap proses pengambilan keputusan, serta bentuk relasi antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada bentuk partisipasi teknis dan belum mengelaborasi sejauh mana partisipasi tersebut mencerminkan kontrol warga (*citizen power*) dalam proses pembangunan.

Penelitian ini menempati posisi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, Kabupaten Jepara, dan menganalisisnya menggunakan teori partisipasi dari Sherry Arnstein. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi level partisipasi yang dominan serta mengungkap apakah keterlibatan masyarakat bersifat substansial atau sekadar simbolik.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini diawali dengan penyusunan kerangka konseptual yang berangkat dari fokus kajian utama yaitu Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Kerangka ini mencakup konsep-konsep utama seperti partisipasi masyarakat, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, serta partisipasi dalam perspektif Islam yang dikontekstualisasikan dalam realitas sosial masyarakat setempat. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teori partisipasi dari Sherry Arnstein dengan pendekatan sosiologis, khususnya melalui model *A Ladder of Citizen Participation*. Teori ini digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari bentuk partisipasi simbolik hingga partisipasi substantif yang menunjukkan pengaruh nyata warga dalam proses pengambilan keputusan pembangunan wisata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kualitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, apakah sebatas pelibatan fisik atau telah mencapai kontrol yang mencerminkan pembangunan berbasis partisipasi sejati.

1. Definisi Konseptual

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu secara aktif dan bermakna dalam semua tahap pembangunan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang berdampak pada lingkungan mereka. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kehadiran fisik tetapi juga komitmen emosional dan psikologis terhadap tujuan bersama. Partisipasi ini menunjukkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan kolaborasi, yang menjadi dasar bagi keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat (Mustanir dan Abadi, 2017).

Keikutsertaan masyarakat Desa Batealit dalam proses pengelolaan wisata air terjun Setatah merupakan wujud dari partisipasi masyarakat. Masyarakat juga saling bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian dari hasil proses tersebut pemanfaatan hasil akan berjalan sendirinya dan masyarakat akan menikmati hasil dari proses tersebut.

b. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu melalui upaya yang konsisten dan perencanaan strategis. Dalam pariwisata, pengelolaan melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus memberi manfaat bagi industri pariwisata, masyarakat setempat, dan pemerintah. Pengelolaan pariwisata adalah strategi jangka panjang yang berfokus pada pencapaian hasil yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Widyaningsih, 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis melihat bahwa wisata air terjun Setatah sedang mengalami proses pengelolaan. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Batealit ingin memajukan potensi yang ada di Desa yang lebih baik terutama di wisata air Terjun Setatah. Tujuan ini berupaya untuk memperbaiki dan memajukan wisata di Desa Batealit serta untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan

c. Partisipasi Masyarakat dalam Prespektif Islam

Tingkat partisipasi dan kerja sama masyarakat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Dalam kerangka sosiologisnya, pentingnya

'*ashabiyah* (partisipasi sosial) sebagai perekat masyarakat yang mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan peradaban. Sejalan dengan itu, masyarakat Islam dibentuk atas dasar hubungan sosial yang bersandar pada kepercayaan, nilai-nilai moral, dan prinsip kebersamaan yang dijunjung tinggi (Arifin dan Rofiq, 2022). Islam mengajarkan prinsip gotong royong sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial umat, dengan mendorong anggotanya untuk saling membantu dan mendukung dalam segala aspek kehidupan.

Perspektif Islam terhadap partisipasi sosial telah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Surah Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS Al-Maidah : 2)

Ayat ini merupakan seruan untuk membentuk masyarakat yang saling membantu dalam kebaikan (*al-birr*) dan menjaga diri dalam ketakwaan (*at-taqwa*). Sebaliknya, Islam melarang bentuk kerja sama yang bertujuan merugikan, melanggar aturan, atau menimbulkan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa kerja sama dalam masyarakat harus dilandasi oleh nilai moral dan keikhlasan untuk mencapai tujuan yang diridhai Allah SWT. (Kementerian Agama, 2012).

Ayat ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi pada pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit. Inisiatif dan keterlibatan warga RT 10/RW 02 dalam merencanakan, membangun, dan menjaga keberlangsungan wisata tersebut mencerminkan prinsip *ta'awun*, yakni kerja sama dalam kebajikan. Kegiatan seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas dasar, hingga pengelolaan parkir dan kebersihan, adalah bentuk nyata partisipasi sosial yang tidak hanya bertujuan duniawi,

melainkan mengandung nilai ibadah karena dilakukan demi kemaslahatan bersama (Arifin dan Rofiq, 2022).

Dilihat dalam konteks sosial Islam, keterlibatan warga dalam pengelolaan wisata adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu menjalin kerja sama secara harmonis, kolektif, dan penuh tanggung jawab. Setiap individu mengambil peran sesuai kapasitasnya, dan mereka melakukannya bukan karena paksaan, tetapi sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab sosial (*fardhu kifayah*) dan kesalingan antar sesama (*ukhuwah*), di mana setiap anggota masyarakat mengambil peran sesuai dengan kapasitas dan niat baik mereka tanpa paksaan eksternal.

Konsep ta'awun dalam Islam merujuk pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Dalam praktik sosial kemasyarakatan, ta'awun tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kerja bakti atau bantuan tenaga fisik, tetapi juga mencakup kontribusi finansial seperti iuran, infak, sedekah, dan bentuk bantuan dana lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Wujud nyata dari semangat ta'awun adalah kesediaan untuk berkorban, baik waktu, tenaga, maupun materi, demi keberlangsungan suatu kegiatan sosial. Dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat, ta'awun terimplementasi dalam bentuk swadaya pembangunan infrastruktur, pemberian donasi sukarela dari pengunjung, serta pengumpulan kas bersama untuk perawatan fasilitas umum. Dengan demikian, ta'awun tidak hanya menjadi nilai moral yang mendorong partisipasi, tetapi juga menjadi fondasi spiritual yang memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Demikian, ajaran Islam tidak hanya memerintahkan kerja sama, tetapi juga mengarahkan bagaimana partisipasi itu harus dijalankan yakni dengan niat yang benar, tujuan yang baik, dan menjauhi bentuk-bentuk interaksi yang merusak. Ayat ini menjadi pedoman normatif bahwa partisipasi sosial masyarakat, sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan air terjun Setatah, adalah bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan produktif.

2. Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

a. Konsep Umum Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Teori partisipasi sosial yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein melalui artikelnya yang terkenal *A Ladder of Citizen Participation* (1969), merupakan pendekatan kritis terhadap praktik pelibatan warga dalam pembangunan. Arnstein menilai bahwa klaim tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sering kali bersifat semu atau simbolik. Oleh karena itu, ia menyusun kerangka berupa tangga partisipasi (*ladder of participation*) yang terdiri dari delapan tingkat partisipasi masyarakat, yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori besar yaitu *non-participation*, *tokenisme*, dan *citizen power* (Arnstein, 1969).

Kategori *non-participation* mencakup dua tingkat terbawah, yakni manipulasi dan terapi, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kategori *tokenisme* terdiri dari tiga tingkat berikutnya, yakni informasi, konsultasi, dan penenangan, di mana masyarakat tampak dilibatkan, namun tidak memiliki kekuatan nyata dalam mempengaruhi hasil keputusan. Sedangkan pada kategori *citizen power*, yang terdiri dari kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga, masyarakat memiliki posisi sejajar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Konteks penelitian di Desa Batealit, khususnya pada pengelolaan wisata air terjun Setatah, teori ini menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat RT 10/RW 02. Pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh warga memberikan indikasi kuat bahwa terdapat inisiatif lokal. Namun demikian, penting untuk menelaah lebih dalam apakah partisipasi tersebut bersifat substantif atau sekadar partisipasi simbolik. Teori Arnstein membantu menjelaskan dimensi kekuasaan dan kontrol yang melekat dalam proses pembangunan berbasis masyarakat, sehingga dapat menilai apakah warga hanya dilibatkan dalam pelaksanaan teknis atau benar-benar menentukan arah kebijakan wisata secara kolektif (Ife dan Tesoriero, 2008).

b. Asumsi Dasar Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Sherry Arnstein mendasarkan teorinya pada asumsi bahwa partisipasi yang sejati harus melibatkan redistribusi kekuasaan, di mana masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif menentukan arah,

isi, dan manfaat pembangunan. Ia berpandangan bahwa struktur sosial yang hirarkis dan ketimpangan akses terhadap informasi menjadi hambatan utama dalam menciptakan partisipasi yang adil dan bermakna. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya melihat keterlibatan masyarakat secara kuantitatif, tetapi menekankan dimensi kualitas dari partisipasi tersebut (Arnstein, 1969).

Penelitian terhadap kasus di Desa Batealit, terlihat bahwa warga RT 10/RW 02 berperan aktif dalam kegiatan pembangunan fisik seperti kerja bakti dan pembangunan infrastruktur wisata. Namun jika ditilik dari lensa teori Arnstein, keaktifan ini belum tentu mencerminkan kekuasaan kolektif. Keputusan strategis mengenai arah pengelolaan wisata, pembagian tugas, atau kebijakan promosi masih didominasi oleh tokoh tertentu seperti ketua RT atau individu yang memiliki pengaruh sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tampak aktif, partisipasi mereka mungkin masih berada dalam kategori *tokenisme*.

c. Konsep Kunci Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Sherry Arnstein menyusun delapan tangga partisipasi yang dikelompokkan dalam tiga kategori besar. Masing-masing tingkatan memiliki karakteristik yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kontrol atas proses pembangunan. Penjabaran tiap kategori dalam konteks penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Non-Participation* (Manipulasi dan Terapi)

Dua tingkat terendah ini menggambarkan kondisi di mana masyarakat tidak benar-benar dilibatkan dalam proses pembangunan. Mereka hanya dimanipulasi untuk mendukung kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa, atau diberi terapi agar menerima kebijakan tersebut tanpa perlawanan. Dalam konteks air terjun Setatah, bentuk partisipasi semacam ini tidak terlalu dominan, mengingat inisiatif pengelolaan datang dari warga sendiri. Namun, jika dalam jangka panjang kegiatan ini mulai dikendalikan oleh pihak luar, seperti pemerintah desa atau investor, maka skema partisipasi bisa mengalami regresi ke tingkat *non-participation* (Arnstein, 1969).

2) *Tokenisme* (Informasi, Konsultasi, dan Penenangan)

Tokenisme menggambarkan situasi di mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan

pihak penguasa. Dalam konteks Desa Batealit, bentuk partisipasi masyarakat seperti rapat musyawarah RT dan konsultasi pengelolaan memang ada, namun cenderung dikuasai oleh figur sentral seperti Ketua RT. Warga lain dilibatkan dalam pelaksanaan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam menyusun arah strategis pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada level *tokenisme* yaitu mereka diberi informasi dan kesempatan untuk berpendapat, tetapi bukan kekuasaan untuk memutuskan (Haris dkk., 2021).

3) *Citizen Power* (Kemitraan, Delegasi Kekuasaan, Kontrol Warga)

Pada tingkat tertinggi ini, masyarakat memiliki kekuasaan sejati untuk menentukan arah dan bentuk pembangunan. Mereka menjadi mitra sejajar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Beberapa indikasi menuju ke tingkat ini terlihat dalam bentuk kerja bakti, pembangunan akses wisata secara mandiri, serta pelibatan aktif karang taruna dalam promosi wisata. Namun dominasi keputusan oleh tokoh tertentu masih menjadi hambatan utama untuk mencapai tingkatan kontrol warga secara penuh. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan mekanisme demokratis di mana keputusan tidak hanya bersumber dari figur kuat, tetapi merupakan hasil deliberasi kolektif yang representatif (Azizah dan Rahayu, 2023).

Melalui model tangga partisipasi ini, Sherry Arnstein memberikan perspektif analisis yang kritis dan praktis untuk memahami relasi kuasa dalam setiap proses pembangunan. Dalam konteks Wisata Air Terjun Setatah, pemetaan partisipasi masyarakat melalui tangga ini dapat membantu menilai sejauh mana keterlibatan warga telah mencapai bentuk *citizen power* yang sejati, atau justru terjebak dalam partisipasi simbolik. Oleh karena itu, teori ini relevan tidak hanya untuk mengukur Tingkat keterlibatan, tetapi juga untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat menuju pembangunan wisata yang lebih demokratis, teratur, dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diterapkan untuk memudahkan proses penulisan dan memperoleh simpulan yang akurat, oleh karena itu penyusunan penelitian ini mengikuti metode yang diuraikan di bawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Penelitian ini difokuskan pada Desa Batealit, di mana peneliti ingin mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah. Metode kualitatif digunakan karena dianggap cocok untuk mengkaji perilaku sosial, praktik budaya, peran organisasi, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan Masyarakat (Rahmat, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan interaksi sosial yang membentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan kondisi masyarakat yang sebenarnya secara sistematis dan faktual (Danim, 2013). Data yang dikumpulkan akan berbentuk narasi deskriptif, yang didasarkan pada informasi langsung dan tidak langsung dari informan yang diamati. Dengan melibatkan masyarakat secara dekat, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana partisipasi kolektif dan dinamika sosial setempat berkontribusi terhadap pengelolaan wisata di air terjun Setatah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui interaksi di lokasi penelitian, yang menjadi dasar utama dalam penelitian (Bungin, 2007). Dalam penelitian ini, data tersebut dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan informan utama dan pendukung yang terlibat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, sehingga menghasilkan temuan yang akurat dan relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung yang diperoleh dari sumber di luar bidang penelitian tetapi masih relevan dengan objek penelitian. Data

sekunder meliputi dokumen, kajian pustaka, dan catatan penelitian (Maryati dan Suryawati, 2006). Dalam penelitian ini, data tersebut dikumpulkan dari dokumen kantor desa, catatan kegiatan masyarakat, dan pustaka terkait untuk melengkapi dan meningkatkan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan:

a. Observasi

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh informasi dari informan. Observasi melibatkan tiga komponen yaitu: 1) lokasi penelitian, 2) informan kunci yang memiliki peran tertentu, dan 3) aktivitas informan tersebut (Ratna, 2010). Penulis menggunakan observasi non partisipan, yaitu mengamati masyarakat Desa Batealit dari luar tanpa terlibat dalam interaksinya, untuk menjaga objektivitas sekaligus memahami keterlibatan mereka dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian sosial kualitatif untuk memperoleh data secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan (Rosaliza, 2015). Dalam penelitian ini, digunakan format wawancara semi-terstruktur, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu namun tetap terbuka terhadap pertanyaan tambahan yang muncul selama proses wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang lebih rinci dan relevan sesuai konteks pembahasan.

Pemilihan informan dilakukan secara *Purposive*. Teknik *Purposive* adalah salah satu teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Sampel diambil secara acak berdasarkan kisi-kisi atau batas-batas yang telah ditentukan peneliti. Teknik penentuan informan dengan *purposive* memiliki kelebihan dan kekurangan, berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu: 1) sehat jasmani dan rohani, 2) bersedia menjadi partisipan, 3)

memiliki keterlibatan aktif dalam pengelolaan pariwisata, 4) mewakili beragam kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti memilih lima informan utama yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

Adapun kelima informan tersebut adalah:

Tabel 1 Data Informan

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1.	Ali Asikin	Kepala Desa Batealit, Kabupaten Jepara
2.	Ahmad Tukul	Ketua RT 10/RW 02, Desa Batealit, Kabupaten Jepara.
3.	Leman	Pengelola wisata Air Terjun Setatah Desa Batealit.
4.	Ahmad Faisal	Pemuda Desa ikut serta dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah.
5.	Shofiatun	Pedagang lokal yang merasakan dampak langsung dari aktivitas wisata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencatat, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan yang relevan dalam proses penelitian (Anggito dan Setiawan, 2018). Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi catatan harian penelitian, arsip, foto, dan buku referensi masyarakat, yang berfungsi untuk melengkapi data observasi dan wawancara, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian dan harus sesuai dengan jenis penelitian (Maryati dan Suryawati, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif, menganalisis pola dan fakta dari berbagai sumber, sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan

temuan lapangan yang konkret. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan untuk memperjelas informasi dan mendukung kesimpulan yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penggalian data yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah, dengan memastikan hanya informasi penting yang dianalisis.

b. Penyajian data

Data penelitian ini, penulis menyajikan data tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi lapangan dan mengarahkan langkah penelitian selanjutnya. Setelah data disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Data tersebut didukung oleh hasil observasi, wawancara, catatan penelitian, dan foto, sehingga dapat memberikan analisis yang terstruktur dan komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

c. Menarik kesimpulan

Pada tahap akhir analisis data, penulis menafsirkan pola dan penjelasan dari data tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah. Proses ini membantu mengungkap makna yang lebih dalam dari temuan. Kesimpulan yang ditarik selaras dengan masalah penelitian dan didasarkan pada kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga hasilnya relevan dan akurat.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi enam bab, yang masing-masing menyajikan bidang diskusi spesifik yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGELOLAAN WISATA, DAN TEORI PARTISIPASI SOSIAL SHERRY ARNSTEIN

Bab ini membahas 1) definisi konseptual 2) teori partisipasi sosial Sherry Arnstein 3) Partisipasi sosial dalam perspektif Islam sebagai rujukan dalam penelitian ini, serta dijadikan kajian bagi masyarakat Desa Batealit dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BATEALIT JEPARA

Bab ini membahas gambaran umum Desa Batealit dilihat dari kondisi geografis, kondisi demografis, sejarah Desa Batealit, dan sejarah Air Terjun Setatah.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH

Bab ini membahas bagaimana masyarakat Desa Batealit berpartisipasi dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit Kabupaten Jepara.

BAB V DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH

Bab ini membahas dampak partisipasi masyarakat Desa Batealit dalam pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit Kabupaten Jepara.

BAB VI PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang satu topik dengan penelitian ini.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGELOLAAN WISATA, DAN TEORI PARTISIPASI SOSIAL SHERRY ARNSTEIN

A. Definisi Konseptual

1. Partisipasi Masyarakat

Istilah "partisipasi" sudah menjadi bagian dari perbendaharaan umum dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini sering diucapkan, baik oleh para ahli maupun masyarakat awam. Namun demikian, belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara universal mengenai pengertian partisipasi. Perbedaan ini disebabkan oleh beragamnya sudut pandang yang digunakan dalam mendefinisikan istilah tersebut.

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu situasi, baik secara mental, intelektual, maupun emosional, yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan bersama dan turut memikul tanggung jawab atas upaya pencapaian tujuan tersebut (Prasetya, 2008). Selain itu, partisipasi adalah dorongan kebutuhan psikologis yang mendasar dalam diri setiap individu, mencerminkan keinginan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok dan aktif dalam berbagai aktivitas (Salusu, 1998).

Secara etimologis, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*participation*" (kata benda) dan "*to participate*" (kata kerja) yang berarti mengambil bagian atau berperan serta. Juliantara, (2002) menyatakan bahwa esensi partisipasi adalah terwujudnya sistem pemerintahan di mana tidak ada kebijakan yang diputuskan tanpa persetujuan masyarakat. Arah utama partisipasi ini adalah proses pemberdayaan.

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan sosial, yang berperan signifikan dalam proses pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya mencakup kehadiran fisik, tetapi juga mencakup sumbangsih pemikiran, tenaga, sumber daya, serta komitmen moral. Proses partisipasi sosial mencakup berbagai tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta menyelesaikan masalah sosial yang ada.

Pada tahap perencanaan, masyarakat diharapkan memberikan gagasan, pandangan, dan aspirasi yang mencerminkan kebutuhan nyata di lingkungan mereka. Selama pelaksanaan program, partisipasi masyarakat bisa berbentuk kontribusi tenaga, pemantauan kegiatan, hingga penyediaan sumber daya. Di tahap evaluasi, masyarakat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program untuk perbaikan ke depan.

Partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program (Adi, 2007). Sedangkan FAO (*Food and Agriculture Organization*) menekankan bahwa partisipasi ideal harus inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Partisipasi inklusif memungkinkan pemerataan kesempatan, pengurangan ketimpangan sosial, dan menjadikan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan dasar penting dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran, tanggung jawab kolektif, dan demokrasi yang sejati, karena masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

2. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu melalui upaya yang konsisten dan perencanaan strategis. Dalam konteks pariwisata, pengelolaan berarti segala bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas, daya tarik, dan keberlanjutan destinasi wisata guna menarik minat wisatawan, meningkatkan jumlah kunjungan, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal, pelaku industri, dan pemerintah (Widyaningsih, 2021). Pengelolaan pariwisata bukan hanya berfokus pada pencitraan atau promosi semata, melainkan mencakup seluruh aspek sistem pariwisata, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, atraksi, aksesibilitas, serta pelayanan yang memadai dan ramah wisatawan.

Pengelolaan pariwisata tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi baik di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Pengelolaan ini harus

mencerminkan prinsip keberlanjutan dan berorientasi jangka panjang agar manfaat yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, namun berkesinambungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara luas (Barreto dan Giantari, 2015).

Pengelolaan pariwisata mencakup pengelolaan sumber daya secara optimal, peningkatan kualitas atraksi wisata, pengadaan fasilitas pendukung seperti penginapan dan restoran, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, komunikasi, dan sanitasi. Semua elemen tersebut harus dikembangkan secara terpadu agar mampu menciptakan pengalaman wisata yang positif, nyaman, dan berkesan bagi wisatawan (Suwantoro, 2004).

Selain itu, Santoso dalam Kurniawan, (2015) menekankan bahwa atraksi wisata dalam pengelolaan pariwisata harus mencerminkan kekhasan dan keunikan lokal, baik yang bersifat alamiah maupun budaya. Namun demikian, atraksi ini tidak cukup hanya eksis, melainkan juga perlu dikelola dan dikembangkan secara kreatif, edukatif, dan lestari agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Pengelolaan pariwisata juga sangat bergantung pada peran serta masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat menjadi aspek kunci yang harus diperhatikan. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan pariwisata. Pendekatan ini bertujuan agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal (Mardikanto, 2010).

B. Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

1. Konsep Umum Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Teori partisipasi sosial yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein melalui artikelnya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation* (1969) memberikan kerangka kritis dalam memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Arnstein menyusun delapan tingkat partisipasi masyarakat yang dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yaitu: *non-participation*, *tokenisme*, dan *citizen power* (Arnstein, 1969).

Model ini memfokuskan pada distribusi kekuasaan dalam proses pembangunan. Arnstein berpendapat bahwa pelibatan masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik, tanpa memberikan kekuasaan riil untuk menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu,

tangga partisipasi ini menjadi alat penting dalam menilai sejauh mana masyarakat benar-benar memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

2. Asumsi Dasar Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Sherry Arnstein mendasarkan teorinya pada asumsi bahwa partisipasi yang sejati harus melibatkan redistribusi kekuasaan, di mana masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif menentukan arah, isi, dan manfaat pembangunan. Ia berpandangan bahwa struktur sosial yang hirarkis dan ketimpangan akses terhadap informasi menjadi hambatan utama dalam menciptakan partisipasi yang adil dan bermakna. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya melihat keterlibatan masyarakat secara kuantitatif, tetapi menekankan dimensi kualitas dari partisipasi tersebut (Arnstein, 1969).

Penelitian terhadap kasus di Desa Batealit, terlihat bahwa warga RT 10/RW 02 berperan aktif dalam kegiatan pembangunan fisik seperti kerja bakti dan pembangunan infrastruktur wisata. Namun jika ditilik dari lensa teori Arnstein, keaktifan ini belum tentu mencerminkan kekuasaan kolektif. Keputusan strategis mengenai arah pengelolaan wisata, pembagian tugas, atau kebijakan promosi masih didominasi oleh tokoh tertentu seperti ketua RT atau individu yang memiliki pengaruh sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tampak aktif, partisipasi mereka mungkin masih berada dalam kategori *tokenisme*.

3. Konsep Kunci Teori Partisipasi Sosial Sherry Arnstein

Konsep kunci partisipasi sosial diklasifikasikan menjadi delapan tingkat partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969). Beberapa Tingkat partisipasi sosial sebagai berikut:

a. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat ini, masyarakat hanya dijadikan alat legitimasi kebijakan yang sudah diputuskan oleh pihak berwenang. Kegiatan partisipatif semu dilakukan hanya untuk mendapatkan persetujuan formal tanpa memberikan ruang diskusi yang sejati.

b. Terapi (*therapy*)

Masyarakat dianggap sebagai objek masalah yang perlu "disembuhkan" melalui pendidikan atau pelatihan, tanpa memperhatikan konteks sosial dan budaya mereka.

Tujuan sebenarnya adalah mengubah perilaku warga agar sesuai dengan agenda yang telah ditentukan.

c. Pemberian Informasi (*Informing*)

Tahap awal dari partisipasi yang sesungguhnya. Masyarakat diberikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan, namun komunikasi berlangsung satu arah, sehingga tidak memberi peluang kepada masyarakat untuk merespons secara aktif.

d. Konsultasi (*Consultation*)

Pada tahap ini, masyarakat diminta untuk memberikan pendapat atau masukan, biasanya melalui forum diskusi atau survei. Namun, tidak ada jaminan bahwa pendapat tersebut akan dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan.

e. Penenangan (*Placation*)

Masyarakat mulai diberikan tempat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui perwakilan dalam panitia. Namun, kekuasaan yang diberikan masih sangat terbatas dan tidak mampu memengaruhi kebijakan secara signifikan.

f. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tahap ini, kekuasaan mulai dibagi antara masyarakat dan pihak berwenang. Mekanisme musyawarah dan kerja sama terbentuk secara formal, dan masyarakat memiliki suara yang dihargai dalam pengambilan keputusan.

g. Delegasi Kekuasaan (*Delegated Power*)

Masyarakat memiliki kendali yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Pemerintah atau otoritas formal menyerahkan sebagian wewenangnya kepada organisasi masyarakat atau masyarakat lokal.

h. Kontrol Warga (*Citizen Control*)

Tahap tertinggi dalam model partisipasi Arnstein. Masyarakat memiliki kekuasaan penuh dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan dan program yang memengaruhi kehidupan mereka.

Model tangga partisipasi Arnstein dapat dijadikan alat analisis yang efektif untuk memahami posisi masyarakat RT 10/RW 02 Desa Batealit dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah. Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi yang telah dilakukan, seperti musyawarah warga, pembentukan panitia pengelola, serta swadaya masyarakat

dalam pembangunan fasilitas dasar, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat saat ini berada pada kategori *tokenisme* yang mulai bergerak menuju *citizen power*. Hal ini tercermin dari adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata, yang menunjukkan kemajuan dari sekadar dimintai pendapat menjadi bentuk kemitraan (*partnership*) dalam pengambilan keputusan.

Namun, di sisi lain, dominasi beberapa tokoh masyarakat atau pengurus panitia dalam pengambilan keputusan strategis masih terlihat cukup kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencapai tahap delegasi kekuasaan (*delegated power*), di mana kewenangan pengelolaan benar-benar berada di tangan masyarakat secara penuh. Untuk melangkah lebih jauh ke tingkat tertinggi dalam model Arnstein, yaitu kendali warga (*citizen control*), diperlukan upaya pembentukan struktur organisasi yang lebih demokratis, transparan, dan teratur. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam aspek manajemen dan pengelolaan wisata menjadi kunci agar mereka dapat mengelola destinasi wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Demikian, penerapan model tangga partisipasi Arnstein di Desa Batealit tidak hanya memberikan gambaran posisi partisipasi saat ini, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang strategi peningkatan keterlibatan warga. Keterlibatan yang lebih kuat ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan wisata air terjun Setatah secara lebih efektif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Islam

Tingkat partisipasi dan kerja sama sosial dalam suatu masyarakat merupakan pilar penting dalam membangun kesejahteraan dan stabilitas sosial jangka panjang. Dalam kerangka sosiologis, partisipasi sosial dikenal sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan kolektif, yang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis dan spiritual. Dalam masyarakat Islam, konsep ini tercermin dalam istilah ‘ashabiyah, yang berarti solidaritas sosial atau loyalitas kolektif yang mengikat individu dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai kepercayaan, kebajikan, dan tanggung jawab bersama. Menurut Arifin dan Rofiq, (2022) ‘ashabiyah memiliki peran strategis sebagai perekat masyarakat dan kekuatan sosial yang mampu menggerakkan

perubahan ke arah kemajuan peradaban. Dalam pandangan ini, partisipasi sosial bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan praktis seperti pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga merupakan ekspresi dari ikatan keimanan dan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab sosial.

Ajaran Islam memberikan landasan yang kuat bagi pentingnya partisipasi sosial sebagai wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya mendorong, tetapi bahkan memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

Artinya:

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Māidah: 2).

Ayat ini menegaskan prinsip dasar partisipasi sosial dalam Islam, yaitu *ta'awun* atau tolong-menolong dalam hal yang membawa maslahat dan mendekatkan kepada ketakwaan. Prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga membentuk norma sosial kolektif yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama secara konstruktif dan saling memperkuat dalam kegiatan pembangunan yang bersifat sosial, ekonomi, dan spiritual.

Ditinjau dalam konteks pengelolaan dan pengelolaan wisata air terjun Setatah di Desa Batealit, prinsip *ta'awun* sangat relevan untuk dijadikan rujukan normatif. Partisipasi masyarakat warga RT 10/RW 02 yang tergambar dalam kegiatan kerja bakti, pembangunan infrastruktur wisata, pembagian peran pengelolaan, serta mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan, seluruhnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang terdorong oleh semangat kebersamaan dan nilai ibadah. Partisipasi ini bukan hanya bersifat instrumental untuk meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga mengandung muatan spiritual karena dilakukan dengan niat untuk kemaslahatan umum. Sebagaimana disebutkan oleh Arifin dan Rofiq,

(2022) kerja sama yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan dilandasi oleh keikhlasan adalah bagian dari perintah agama yang bernilai ibadah.

Lebih dari sekadar aktivitas sosial, keterlibatan warga dalam pengelolaan wisata air terjun Setatah merupakan wujud dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu bentuk hubungan sosial yang mengarah pada kerja sama, integrasi, dan solidaritas. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola sosial mereka. Mereka tidak menunggu arahan eksternal, tetapi secara proaktif mengambil peran dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Setiap individu terlibat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, tanpa paksaan atau iming-iming materi, melainkan karena kesadaran spiritual bahwa menjaga dan memajukan potensi desa adalah bagian dari amanah sosial yang harus ditunaikan secara kolektif. Dalam hal ini, semangat gotong royong yang dibangun bukanlah sekadar kebiasaan budaya, melainkan sebuah pengejawantahan dari nilai *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang jika ditunaikan oleh sebagian anggota masyarakat, maka gugurlah kewajiban yang lain.

Islam tidak hanya menetapkan bahwa partisipasi masyarakat itu penting, tetapi juga menetapkan bahwa partisipasi harus dijalankan dalam bingkai moral dan spiritual yang benar. Surah Al-Mā'idah ayat 2 menekankan batasan yang jelas bahwa partisipasi tidak boleh diarahkan pada perbuatan dosa atau permusuhan. Oleh karena itu, kerja sama dalam masyarakat tidak bisa semata-mata berdasarkan kepentingan pragmatis atau materialistik, tetapi harus didasari oleh kejujuran, keadilan, dan keikhlasan. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga integritas sosial dan mencegah terjadinya konflik atau penyimpangan dalam proses pembangunan. Di Desa Batealit, hal ini tercermin dari proses pengambilan keputusan yang dilandasi oleh musyawarah mufakat, distribusi peran yang adil, dan penghindaran dominasi oleh kelompok tertentu. Semua proses tersebut mencerminkan tata kelola sosial berbasis Islam yang menjunjung tinggi prinsip *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *ukhuwwah* (persaudaraan).

Konsep ta'awun dalam Islam merujuk pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Dalam praktik sosial kemasyarakatan, ta'awun tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kerja bakti atau bantuan tenaga fisik, tetapi

juga mencakup kontribusi finansial seperti iuran, infak, sedekah, dan bentuk bantuan dana lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Wujud nyata dari semangat ta'awun adalah kesediaan untuk berkorban, baik waktu, tenaga, maupun materi, demi keberlangsungan suatu kegiatan sosial. Dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat, ta'awun terimplementasi dalam bentuk swadaya pembangunan infrastruktur, pemberian donasi sukarela dari pengunjung, serta pengumpulan kas bersama untuk perawatan fasilitas umum. Dengan demikian, ta'awun tidak hanya menjadi nilai moral yang mendorong partisipasi, tetapi juga menjadi fondasi spiritual yang memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perspektif Islam bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai perintah *ilahiyah* yang membentuk karakter masyarakat yang beriman, produktif, dan kolaboratif. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Mā'idah ayat 2 memberikan landasan teologis yang kuat bahwa pembangunan, termasuk pembangunan wisata berbasis masyarakat seperti di air terjun Setatah, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kerja sama dalam kebaikan, kesetaraan peran, dan kesadaran spiritual yang tinggi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat warga Batealit menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi hiasan normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Inilah esensi partisipasi sosial dalam Islam, bukan sekadar alat pembangunan, tetapi sebagai jalan menuju keberkahan dan keberlanjutan hidup bersama.

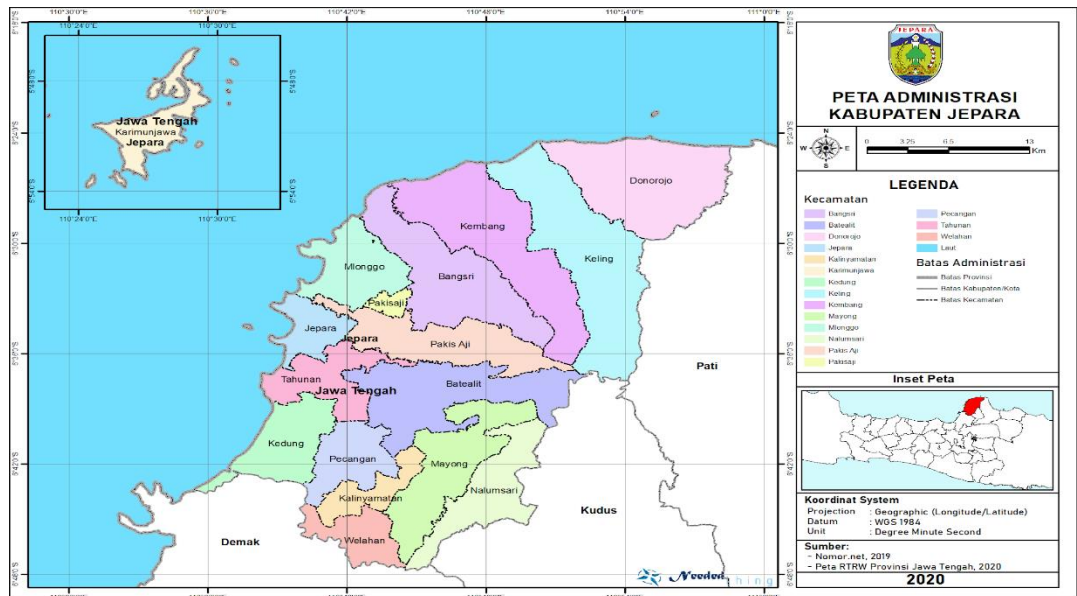
GAMBARAN UMUM DESA BATEALIT JEPARA

A. Kondisi Geografis Desa Batealit

1. Letak Geografis Kecamatan dan Desa Batealit, Kabupaten Jepara

Kecamatan Batealit merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini secara geografis berada di lereng Gunung Muria dengan ketinggian wilayah yang bervariasi antara 18 hingga 378 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas wilayah Kecamatan Batealit mencapai sekitar 10.027,74 hektar (sekitar 100,28 km²), yang terdiri dari 6.649,30 hektar lahan kering dan 2.238,56 hektar lahan persawahan. Kecamatan ini berjarak sekitar 12 kilometer dari pusat kota Jepara (BPS Kabupaten Jepara, 2020).

Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

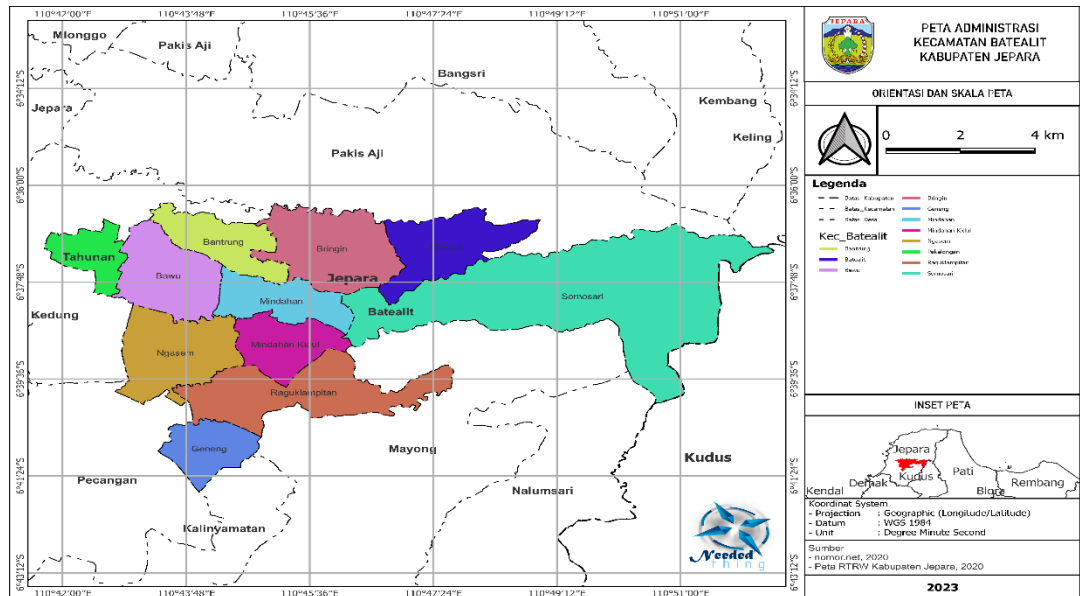


Sumber: http://pustadataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/peta/Peta-Wilayah-Administari_Jateng.jpg. *Diunduh pada tahun 2025*

Secara koordinat geografis, Kecamatan Batealit terletak di antara 110°41'44,94" hingga 110°52'23,90" Bujur Timur dan 6°36'22,15" hingga 6°41'41,96" Lintang Selatan. Posisi ini memberikan Kecamatan Batealit letak yang

strategis dan menjadi penghubung berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah timur (BPS Kabupaten Jepara, 2020).

Gambar 3 Peta Wilayah Kecamatan Batealit



Sumber: <https://www.peta-hd.com/2019/01/peta-kabupaten-jepara.html>. Diunduh pada tahun 2025

Desa Batealit, yang merupakan bagian dari Kecamatan Batealit, memiliki batas wilayah yang menghubungkan berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah timur.

2. Batas Wilayah Desa Batealit

Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Kembang, Kecamatan Keling, Kecamatan Pakis Aji, dan Kecamatan Bangsri. Wilayah di utara ini didominasi aktivitas pertanian dan perkebunan dengan topografi datar hingga bergelombang ringan yang memudahkan akses dan mobilitas antarwilayah.

Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Mayong, Kecamatan Kalinyamatan, dan Kecamatan Pecangaan. Daerah ini memiliki lahan pertanian subur dengan area rawa yang berpotensi mengalami genangan air saat musim hujan.

Timur: Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus, menjadi titik perbatasan administratif sekaligus jalur penting mobilitas dan interaksi ekonomi antarwilayah.

Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Tahunan, wilayah pesisir yang didominasi dataran rendah dengan kontur rata, berdekatan dengan Laut Jawa sehingga desa ini mendapatkan pengaruh iklim pesisir serta potensi ekonomi kelautan.

Desa Batealit memiliki kontur wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan kecil dengan elevasi antara 5 hingga 50 meter di atas permukaan laut. Area dataran rendah terutama digunakan untuk pertanian padi dan hortikultura, sementara daerah perbukitan dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan dan kehutanan. Sistem drainase di desa ini tergolong baik dengan beberapa sungai kecil yang mengalir ke hilir, mendukung irigasi dan menjaga kesuburan tanah (BPS Kabupaten Jepara, 2020).

Dengan kondisi geografis tersebut, Desa Batealit dan Kecamatan Batealit secara keseluruhan memiliki potensi yang cukup baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan juga pengelolaan sektor kelautan di wilayah barat dekat pesisir. Letak yang strategis di lereng Gunung Muria dan akses yang mudah ke kota Jepara serta kabupaten tetangga mendukung perkembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini.

B. Kondisi Demografis Desa Batealit

1. Demografi Kecamatan Batealit

Kecamatan Batealit merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 11 desa, yaitu: Desa Ngasem, Desa Geneng, Desa Raguklampitan, Desa Mindahan Kidul, Desa Mindahan, Desa Sumosari, Desa Batealit, Desa Bawu, Desa Bringin, Desa Bantrung, dan Desa Pekalongan. Jarak dari masing-masing desa ke kantor kecamatan bervariasi, namun rata-rata masih dalam jangkauan kendaraan pribadi dan umum (Batealit, 2024).

2. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Batealit tercatat sebanyak 84.741 jiwa, terdiri dari 42.802 laki-laki dan 41.939 perempuan (BPS Kabupaten Jepara, 2024). Dilihat dari kelompok usia, penduduk Kecamatan Batealit terbagi ke dalam tiga kategori, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Tingkat Usia Penduduk Kecamatan Batealit

NO	Usia Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	0 – 14 tahun	19.866
2.	15 – 64 tahun	59.468
3.	65 tahun ke atas	5.447

Sumber: *BPS Kabupaten Jepara, Tahun 2024*

Berdasarkan data tersebut, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi komposisi demografi Kecamatan Batealit dengan persentase sekitar 70,2% dari total jumlah penduduk.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Batealit juga menunjukkan keragaman, dengan dominasi lulusan Sekolah Dasar (SD). Berikut rincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Batealit

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	382
2.	Sekolah Dasar (SD)	1.742
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	220
4.	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)	1.554

Sumber: *Desa Batealit Tahun 2024*

Tingkat pendidikan terbanyak adalah SD sebanyak 1.742 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah SMP yaitu 220 jiwa (Batealit, 2024).

4. Mata Pencarian dan Fasilitas Umum

Mata pencarian utama masyarakat Kecamatan Batealit adalah sebagai petani sawah. Namun, banyak pula yang bekerja sebagai buruh industri, pedagang, atau sektor informal lainnya.

Fasilitas umum yang tersedia cukup lengkap, yaitu Masjid dan musholla, Pasar rakyat, Sekolah (TK hingga SMA), Puskesmas, Polsek (Kepolisian Sektor), Lapangan sepak bola dan fasilitas olahraga (Batealit Sport Center), Bank dan layanan keuangan lainnya (Batealit, 2024).

5. Potensi Wisata Alam

Kecamatan Batealit memiliki kekayaan alam yang potensial sebagai destinasi wisata. Hampir setiap desa memiliki objek wisata alam yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah (Batealit, 2024).

Air Terjun Setatah yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu potensi wisata alam yang memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan destinasi wisata lainnya di kawasan Jepara bagian timur. Keindahan air terjun ini terletak pada nuansa alami yang masih sangat terjaga. Airnya bersumber dari belik atau mata air murni yang mengalir dari kawasan perbukitan dan mengalir membentuk curug kecil dengan kolam dangkal yang sering digunakan pengunjung untuk bermain air. Hamparan sawah dan tebing hijau yang mengelilingi lokasi memberikan suasana asri dan sejuk, cocok sebagai tempat beristirahat dari hiruk pikuk kehidupan kota.

Sejak dibuka oleh warga sekitar pada tahun 2019, jumlah kunjungan ke Air Terjun Setatah terus meningkat, khususnya pada akhir pekan dan hari libur nasional. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola, tingkat kunjungan paling tinggi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, terutama dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Selain itu, lonjakan pengunjung juga terjadi pada musim liburan sekolah dan hari-hari besar nasional seperti Idul Fitri dan Tahun Baru. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Desa Batealit saja, tetapi juga dari berbagai daerah sekitar, seperti Kecamatan Mayong, Bangsri, dan Tahunan di Kabupaten Jepara. Bahkan terdapat pengunjung dari luar kabupaten seperti Kudus dan Pati, yang umumnya mengetahui informasi tentang air terjun ini melalui media sosial atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun promosi

belum dilakukan secara masif, Air Terjun Setatah sudah mulai dikenal oleh masyarakat regional sebagai salah satu destinasi wisata alternatif yang murah, alami, dan nyaman.

Daya tarik utama Air Terjun Setatah tidak hanya terletak pada keindahan panoramanya, tetapi juga pada nuansa partisipatif yang terasa dalam pengelolaan kawasan tersebut. Seluruh aktivitas pengelolaan, perawatan, hingga pembangunan fasilitas penunjang dilakukan secara swadaya oleh warga RT 10/RW 02. Partisipasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Batealit.

Dari segi sarana dan prasarana, kawasan Air Terjun Setatah telah mengalami perkembangan secara bertahap. Di tahun-tahun awal, pengunjung hanya bisa menempuh jalur tanah sempit yang licin di musim hujan. Namun sejak tahun 2021, warga secara bergotong royong memperkuat jalur tersebut menggunakan cor semen, sehingga lebih aman dan nyaman dilalui oleh pejalan kaki. Saat ini, jalur menuju lokasi sudah dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh sekitar 300 meter dari area parkir yang disediakan oleh warga. Area parkir ini dikelola oleh pemuda desa dengan sistem jaga bergilir, dan meskipun masih sederhana berupa lahan terbuka di dekat jalan desa sudah cukup memadai untuk kendaraan roda dua dan sebagian kendaraan roda empat.

Fasilitas lain yang tersedia adalah warung kecil milik warga yang menjual makanan ringan dan minuman, seperti gorengan, mie instan, air mineral, dan kopi. Keberadaan warung ini tidak hanya membantu pengunjung, tetapi juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga sekitar. Di samping itu, tersedia juga toilet umum yang dibangun dari dana swadaya, meskipun kondisinya masih sederhana dan jumlahnya terbatas. Musholla juga telah disediakan di salah satu saung bambu dekat area parkir, walaupun masih bersifat sementara dan menggunakan alas tikar, namun cukup memfasilitasi pengunjung yang ingin menjalankan ibadah.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pos keamanan wisata atau petugas tetap yang menjaga area air terjun. Hal ini menjadi salah satu catatan penting dalam aspek pengelolaan, terutama jika terjadi hal-hal darurat seperti kecelakaan atau kehilangan. Ketiadaan pos keamanan ini bukan karena pengabaian, tetapi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Meski demikian, pengunjung tetap

merasa aman karena adanya penjagaan informal dari para pemuda yang secara sukarela mengatur parkir dan mengawasi pengunjung secara bergiliran. Air Terjun Setatah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang unggul di kawasan Jepara. Di samping air terjun Setatah terdapat air terjun lainnya di kecamatan batealit, sebagai berikut:

Tabel 4 Objek Wisata Alam di Kecamatan Batealit

NO	Desa	Objek Wisata
1.	Batealit	Air Terjun Setatah, Sumenep, Grenjengan, Watu Bobot, Kali Dayung, Hutan Pinus Setro, Kali Dayung
2.	Sumosari	Air Terjun Dong Paso, Banyu Anjlok, Warung Kecemplung, Astana Hinggil, Bukit Kandang Ayam, Telaga Harun
3.	Raguklampitan	Wisata Padas, Air Terjun Wergol
4.	Pekalongan	Belik Godrak, Pertapaan Dewi Sekar Tanjung
5.	Geneng	Green Park
6.	Bantrung	Air Terjun Kali Sumur
7.	Bringin	Kedung Nglampok

Sumber: *Kecamatan Batealit Tahun 2024*

C. Sejarah Desa Batealit

Desa Batealit merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di wilayah perbukitan bagian timur Jepara, serta memiliki akses langsung ke berbagai potensi alam seperti hutan, sungai, dan air terjun. Sejarah Desa Batealit telah dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan tradisi agraris dan religius masyarakat Jepara. Mata pencaharian utama masyarakat sejak dahulu kala adalah bertani dan beternak, dengan sistem sosial yang menjunjung tinggi gotong royong dan musyawarah. Selain itu, wilayah ini juga

memiliki tradisi keagamaan yang kuat, terbukti dari banyaknya musholla dan kegiatan keagamaan yang masih rutin dijalankan hingga saat ini

Gambar 4 Desa Batealit



Sumber: Dokumentasi dari Peneliti

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Asikin selaku Kepala Desa Batealit diperoleh *Pertama*, Asal usul Nama "Batealit" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "Batu" dan "Elit", yang secara tradisional merujuk pada keberadaan bebatuan besar dan khas yang banyak ditemukan di wilayah tersebut. Dalam perkembangan waktu, istilah ini kemudian mengalami penyederhanaan fonetik menjadi Batealit. *Kedua*, Desa Batealit juga merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Batealit, yang keberadaannya tercatat dalam dokumen-dokumen administratif sejak masa penjajahan Belanda. Namun, sejarah lisan menyebutkan bahwa pemukiman di kawasan ini telah ada jauh sebelumnya, ditandai dengan temuan mata air (belik), situs makam leluhur, dan hutan adat yang dihormati oleh warga sekitar. Keberadaan belik-belikan (sumber air tradisional) inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya lokasi-lokasi penting seperti Air Terjun Setatah. *Ketiga*, Seiring waktu, Desa Batealit mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi jumlah penduduk, infrastruktur, maupun ekonomi lokal. Sektor pariwisata mulai tumbuh dalam satu dekade terakhir, seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap potensi alam yang mereka miliki. Salah satunya adalah pengelolaan wisata alam Air Terjun Setatah, yang menjadi bentuk adaptasi masyarakat

terhadap peluang ekonomi alternatif di luar sektor pertanian (wawancara dengan Bapak Ali Asikin, 2025).

Latar sejarah yang cukup Panjang. Desa Batealit menjadi representasi desa di Jepara yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian alam, dan perkembangan sosial ekonomi. Hal inilah yang menjadi kekuatan sosial dalam mendorong keberhasilan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat seperti pada Air Terjun Setatah.

D. Sejarah Air Terjun Setatah

Air Terjun Setatah yang terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara merupakan salah satu destinasi wisata alam yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan cukup pesat. Namun di balik popularitasnya sebagai tempat wisata, lokasi ini menyimpan sejarah panjang yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat desa. Asal-usul Air Terjun Setatah bukanlah bermula sebagai kawasan wisata, melainkan sebagai sumber mata air tradisional yang dikenal oleh masyarakat lokal sebagai belik atau sendang.

Gambar 5 Wisata Air Terjun Setatah



Sumber: Dokumentasi dari Peneliti

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahad Tukul Ketua RT 10/RW 02 serta pengelola Wisata Air Terjun Setatah diperoleh beliau mengatakan:

“Ya Sejarahnya Air Terjun Setatah, zaman dulu itu istilahnya Sendang atau juga belik, di atasnya air terjun Setatah itu kan ada beliknya besar dan ada batu besar ukuran truk. Asal mulanya dibuat ambil air minum warga, makanya dinamakan Air Terjun Setatah karena ‘ditatahi’.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Pernyataan dari bapak Ahmad Tukul, asal usul Air Terjun Setatah yaitu berupa belik yang merujuk pada mata air alami yang menjadi tempat utama bagi warga desa untuk mengambil air minum. Sebelum adanya sumur atau jaringan air bersih, masyarakat sangat bergantung pada belik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kawasan Air Terjun Setatah, belik tersebut berada di bagian atas aliran air terjun dan dikelilingi oleh batu berukuran besar, bahkan ada yang disebut sebesar truk. Air dari belik ini mengalir secara alami ke bawah, menciptakan aliran yang deras dan membentuk air terjun. Karena air dari belik ini mengalir secara “ditatahi” sebuah istilah lokal yang berarti ditata atau diarahkan maka kawasan ini kemudian dikenal sebagai Air Terjun Setatah. Nama tersebut merupakan hasil penyebutan lokal yang tumbuh secara organik dari interaksi masyarakat dengan lingkungannya (Wawancara Ahmad Tukul, 2025).

Selain itu belik ini digunakan secara intensif oleh warga sebagai sumber air minum. Proses pengambilan air dilakukan secara tradisional, dengan menggunakan buyung (wadah tanah liat) yang dipanggul menuju rumah masing-masing. Aktivitas ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan telah menjadi bagian dari rutinitas hidup masyarakat, bahkan sebelum kelahiran generasi yang hidup saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber air tersebut telah ada sejak beberapa dekade yang lalu dan menjadi bagian dari sistem sosial-ekologis desa. Transformasi kawasan ini dari fungsi domestik menjadi fungsi wisata terjadi sekitar lima tahun terakhir. Perubahan tersebut tidak terjadi karena intervensi pemerintah ataupun lembaga swasta, melainkan murni karena inisiatif masyarakat setempat. Ketika kebutuhan air bersih mulai dipenuhi oleh sumur dan sistem modern, warga mulai menyadari potensi keindahan alam di sekitar belik dan air terjun yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Proses inisiatif ini muncul secara bertahap, diawali dari kegiatan pembersihan kawasan, pembukaan akses jalan, hingga penyediaan fasilitas dasar wisata.

Pembangunan awal kawasan wisata ini dilakukan melalui swadaya masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun biaya. Tidak terdapat kontribusi langsung dari pemerintah desa dalam bentuk pendanaan ataupun pembangunan fasilitas. Gotong royong menjadi nilai utama dalam proses pembentukan kawasan wisata ini, memperlihatkan adanya semangat kolektivitas dan kepedulian terhadap potensi sumber daya lokal. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengelolaan kawasan ini

adalah seorang warga bernama Bapak Leman, yang juga memiliki lahan sawah di sekitar lokasi air terjun. Beliau menjadi penjaga dan pengelola utama yang memastikan kawasan ini tetap terjaga dan dapat diakses oleh pengunjung. Meskipun pengelolaan kawasan wisata ini berjalan dengan cukup baik, masyarakat juga memperhatikan dampak kunjungan wisata terhadap lingkungan sekitar. Menariknya, hingga saat ini belum ditemukan adanya protes warga terkait perilaku pengunjung. Hal ini menandakan bahwa baik masyarakat maupun wisatawan memiliki kesadaran lingkungan yang cukup baik. Pengunjung umumnya menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan menghormati norma setempat (Hasil Wawancara Ahmad Tukul, 2025).

Air Terjun Setatah memiliki akar sejarah yang kuat sebagai sumber kehidupan masyarakat desa dan kemudian bertransformasi menjadi objek wisata alam berbasis swadaya masyarakat. Asal-usulnya yang berangkat dari kebutuhan dasar manusia (air minum), semangat gotong royong dalam pengelolaan, serta keberhasilan dalam pengelolaan kolektif menjadikan Air Terjun Setatah sebagai contoh konkret pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Ke depan, harapannya kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jepara.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH

Partisipasi masyarakat merupakan dasar utama dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, serta evaluasi kegiatan pembangunan. Dalam konteks desa, partisipasi tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kemandirian dan keberlanjutan lingkungan sekitar (Mustanir dan Abadi, 2017).

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi warga dalam pembangunan destinasi wisata dapat memperkuat jejaring sosial, menumbuhkan rasa kepemilikan, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola potensi desa (Wibowo dan Bella, 2023). Air Terjun Setatah yang terletak di RT 10/RW 02 Desa Batealit merupakan contoh konkret bagaimana peran aktif masyarakat dapat mengubah potensi alam menjadi sumber kesejahteraan bersama.

Pengelolaan wisata Air Terjun Setatah yang berada di RT 10/RW 02 Desa Batealit merupakan inisiatif mandiri masyarakat yang tumbuh secara bertahap sejak tahun 2019. Proses pengelolaan kawasan ini dilakukan secara swadaya tanpa adanya intervensi dari pemerintah desa ataupun dukungan dari pihak swasta. Tahapan-tahapan perkembangan kawasan wisata ini menunjukkan bagaimana semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat terus berkembang hingga membentuk sistem pengelolaan yang lebih terorganisir.

Pada tahun 2019, Air Terjun Setatah pertama kali mulai dibuka secara informal oleh warga sekitar. Saat itu, akses menuju lokasi masih berupa jalan tanah kecil yang licin dan curam, terutama saat musim hujan. Belum tersedia fasilitas apa pun di sekitar area air terjun, dan kunjungan hanya dilakukan oleh warga lokal yang ingin menikmati pemandangan atau mencari air dari belik (mata air) yang menjadi sumber utama air terjun tersebut.

Memasuki tahun 2020, kesadaran masyarakat untuk menata kawasan wisata mulai tumbuh. Warga melakukan gotong royong untuk membangun tempat istirahat sederhana

menggunakan bambu dan papan kayu di sekitar area air terjun. Selain itu, mulai berdiri beberapa warung kecil yang dikelola oleh warga untuk melayani kebutuhan pengunjung, seperti menjual minuman, makanan ringan, dan rokok. Tahun ini menjadi titik awal meningkatnya semangat kolektif warga dalam mengelola potensi wisata lokal mereka.

Pada tahun 2021, meskipun jumlah pengunjung masih tergolong sedikit, warga tetap melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap. Jalur tanah menuju air terjun mulai diperkeras dengan cor semen untuk memudahkan akses pejalan kaki. Selain itu, warga juga membangun area parkir swadaya di dekat pintu masuk dan menambahkan fasilitas toilet umum sederhana. Pembangunan ini sepenuhnya didanai dari iuran warga RT dan kas musyawarah lingkungan, tanpa bantuan eksternal.

Tahun 2022 ditandai dengan peningkatan fasilitas rekreasi di area air terjun. Masyarakat menambahkan spot-spot foto yang menarik seperti ayunan tali, tempat duduk bambu, dan papan petunjuk arah untuk memudahkan pengunjung. Elemen estetika ini sekaligus menjadi daya tarik tambahan yang disesuaikan dengan tren wisata alam berbasis fotografi yang populer di media sosial. Pembangunan ini kembali dilakukan dengan cara swadaya, baik dari segi tenaga maupun bahan bangunan.

Memasuki tahun 2023 hingga 2024, kawasan Air Terjun Setatah mulai dikenal oleh pengunjung dari luar Desa Batealit, bahkan dari luar Kabupaten Jepara seperti Kudus dan Pati. Meningkatnya kunjungan ini mendorong warga untuk membentuk struktur pengelolaan yang lebih sistematis melalui pembentukan panitia pengelola wisata di tingkat RT. Panitia ini terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan warung, yang bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengaturan kebersihan, parkir, distribusi tugas, serta pengumpulan kas kolektif untuk kebutuhan pengelolaan lanjutan. Meskipun bersifat informal, pembentukan struktur ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar partisipasi spontan menuju manajemen berbasis komunitas.

Secara umum, rentang waktu lima tahun ini kawasan wisata ini berkembang dengan tetap mempertahankan nuansa alam, kesederhanaan fasilitas, dan keterlibatan langsung warga dalam pengelolaan. Maka dari itu Penelitian ini akan membahas analisis bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah, menganalisis tingkat partisipasi berdasarkan teori Sherry Arnstein (1969), serta menggambarkan peran kelompok sosial dalam mendukung pengelolaan wisata secara swadaya. Dengan

memahami proses ini, diharapkan muncul gambaran utuh mengenai partisipasi sebagai kekuatan utama pembangunan desa yang berkelanjutan.

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah

Pengelolaan wisata berbasis Masyarakat telah menjadi pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu contoh implementasi yang menonjol adalah pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di RT 10/RW 02 Desa Batealit, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini tumbuh secara swadaya, tanpa dukungan dana dari pemerintah desa maupun pihak luar, melainkan sepenuhnya didorong oleh kesadaran dan semangat gotong royong masyarakat setempat (Ginting dkk., 2023).

Memahami bagaimana bentuk partisipasi masyarakat termanifestasi dalam praktik pengelolaan wisata berbasis masyarakat, dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu partisipasi fisik-material dan partisipasi sosial-manajerial berbasis nilai.

1. Partisipasi Fisik dan Material

Pengelolaan wisata berbasis masyarakat telah menjadi pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengelolaan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu bentuk nyata dari pendekatan ini tampak dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di RT 10/RW 02 Desa Batealit, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini tumbuh secara swadaya, tanpa dukungan dana dari pemerintah desa maupun pihak luar, melainkan sepenuhnya didorong oleh kesadaran kolektif dan semangat gotong royong masyarakat setempat (Ginting dkk., 2023).

Partisipasi fisik dan material mencakup kontribusi langsung masyarakat dalam bentuk tenaga, sumber daya, dan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan wisata. Di Air Terjun Setatah, warga secara aktif terlibat sejak tahap awal, khususnya dalam membuka akses jalan, membangun toilet umum, area parkir, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Proses ini berlangsung secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki warga.

Sebagaimana diungkapkan oleh Leman, salah satu tokoh warga sekaligus pengelola awal wisata air terjun Setatah:

“Ya, masyarakat semua yang bangun, tidak ada dari pemerintah. Dulu itu air terjun cuma tempat orang ambil air minum, belum ada akses jalan, jadi kami buka jalan, beberapa jalan disemen, terus pelan-pelan dibangun.” (Wawancara Leman, 2025)

Pembangunan dilakukan dengan sistem kerja gotong royong yang berlangsung secara rutin, umumnya pada akhir pekan. Warga bergiliran bekerja sesuai kapasitas masing-masing, mulai dari membawa bahan material, tenaga kerja, hingga menyediakan konsumsi.

Ahmad Tukul, Ketua RT 10, menjelaskan lebih lanjut:

“Kalau ada kegiatan pembangunan, misalnya mau cor jalan atau bangun toilet, kami warga saling bantu. Yang punya semen ya nyumbang semen, yang punya pasir bawa pasir. Kalau nggak punya bahan ya bantu tenaga. Kadang ibu-ibu masak buat orang yang kerja.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Gambar 6 Gotong Royong Warga



Sumber: *Dokumentasi Desa Batealit*

Bentuk partisipasi ini tidak digerakkan oleh motif ekonomi, tetapi lebih didasari oleh nilai kekeluargaan dan tanggung jawab kolektif. Tidak ada imbalan finansial atau proyek berbayar, melainkan kontribusi moral dan sosial sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi implementatif yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan berdasarkan kepentingan Bersama (Mustanir dan Abadi, 2017).

Kawasan Air Terjun Setatah juga telah dilengkapi dengan fasilitas dasar yang dibangun atas inisiatif warga. Salah satu fasilitas penting yang telah tersedia adalah toilet umum. Fasilitas ini dibangun secara swadaya oleh warga RT 10/RW 02 menggunakan dana kas lingkungan yang dikumpulkan melalui iuran dan infak pengunjung. Meskipun masih sederhana dari segi konstruksi, keberadaan toilet ini sangat membantu pengunjung, terutama saat musim liburan atau akhir pekan ketika jumlah wisatawan meningkat.

Gambar 7 Toilet Pengunjung



Sumber: Dokumentasi Dari Peneliti

Di samping itu, warga juga menyediakan sebuah papan arah lokasi Air Terjun Setatah dan musholla sederhana yang berada tidak jauh dari area air terjun. Papan arah lokasi Air Terjun Setatah ini dibangun menggunakan bahan-bahan seadanya, seperti kayu dan besi. Selain itu fasilitas musholla juga dilengkapi dengan tikar dan tempat wudhu, musala ini sudah dapat digunakan pengunjung untuk menjalankan ibadah salat, terutama bagi mereka yang berkunjung dalam waktu yang cukup lama. Kedua fasilitas ini menjadi bukti nyata adanya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan, sekaligus mencerminkan bentuk nyata partisipasi masyarakat.

Gambar 8 Papan Arah Air Terjun Setatah



Sumber: *Dokumentasi Dari Peneliti*

Dari sisi pendanaan, seluruh kegiatan dibiayai secara mandiri. Dana dihimpun melalui kas RT dan musholla, serta dari retribusi pengunjung yang kemudian dikelola untuk perbaikan fasilitas dan kegiatan warga. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Ya kalau ada kas, ya masuknya ke kas lingkungan RT dan musholla. Dana retribusi dari pengunjung juga disetor ke kas RT. Nanti dipakai untuk perbaikan fasilitas dan kegiatan warga.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Model pembiayaan ini mencerminkan konsep kemandirian masyarakat lokal, Keberhasilan pembangunan desa harus bersandar pada kekuatan internal masyarakat, bukan pada bantuan eksternal. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kesepakatan kolektif melalui rapat warga, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah desa (Sumarto, 2005).

Jika dianalisis menggunakan teori tangga partisipasi Sherry Arnstein, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik dan material di Air Terjun Setatah menunjukkan kecenderungan berada pada tingkat *Placation*, yaitu salah satu tahap dalam kategori *Tokenisme*. Pada level ini, warga diberikan ruang untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan, namun pengambilan keputusan strategis masih sangat terbatas dan bersifat informal (Arnstein, 1969).

Kegiatan pembangunan dijalankan melalui keputusan tokoh-tokoh lokal, seperti Ketua RT dan pengelola utama. Warga lainnya umumnya mengikuti arahan yang telah disepakati dalam lingkaran kecil, dan meskipun terdapat rapat warga,

keputusan pembangunan lebih sering bersumber dari inisiatif tokoh masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan arah kebijakan atau merancang sistem wisata secara partisipatif dari awal.

Sherry Arnstein menyebut, *Placation* sebagai bentuk keterlibatan “setengah jalan”, di mana masyarakat tampak aktif di permukaan tetapi belum memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan inti. Dalam konteks ini, partisipasi warga cenderung diposisikan sebagai pelaksana program yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan sebagai pemilik rencana. Maka, meskipun kontribusi warga sangat besar secara fisik dan material, bentuk keterlibatan ini belum bisa disebut sebagai bentuk pemberdayaan yang sejati (Arnstein, 1969).

Keterlibatan semacam ini, meskipun memiliki nilai sosial yang tinggi, tetap harus dikembangkan menuju bentuk partisipasi yang lebih deliberatif dan berbasis kekuasaan sejajar. Maka penting untuk menyadari bahwa tahap *Placation* adalah titik awal menuju *Partnership* dan *Delegated Power* dalam model Arnstein, yang mengedepankan distribusi kekuasaan dalam proses pembangunan..

2. Partisipasi Sosial, Manajerial, dan Berbasis Nilai

Masyarakat juga terlibat aktif dalam aspek sosial dan manajerial yang menopang pengelolaan wisata Air Terjun Setatah. Keterlibatan ini terlihat dari rutinitas musyawarah lingkungan yang digelar secara konsisten setiap malam Jumat. Forum ini menjadi wadah bagi warga untuk mendiskusikan perkembangan, permasalahan, dan rencana kegiatan terkait pengelolaan wisata.

Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Tukul:

“Setiap malam Jum'at ada perkumpulan RT, di situ dibahas apa yang perlu dibangun dan bagaimana pengelolaannya. Saya biasanya menyampaikan perkembangan Air Terjun Setatah di situ.”
(Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Gambar 9 Perkumpulan RT Desa Batealit



Sumber: *Dokumentasi Desa Batealit*

Ruang musyawarah ini mencerminkan bentuk partisipasi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga interaktif dan deliberatif, di mana masyarakat secara sukarela terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan tanpa tekanan dari pihak luar. Partisipasi ini menandakan tingginya tingkat kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (Nabila dan Purwohandoyo, 2021).

Forum malam Jumat juga berperan sebagai ruang diskusi terbuka yang menghadirkan warga dari beragam latar belakang usia, profesi, dan peran sosial. Di forum ini, warga bebas menyampaikan gagasan, masukan, maupun kritik terhadap pengelolaan wisata. Situasi ini mencerminkan sistem pengambilan keputusan yang bersifat inklusif dan dialogis, sangat berbeda dari pendekatan top-down yang cenderung eksklusif dan birokratis.

Hal ini sejalan dengan pandangan Wibowo dan Bella, (2023) bahwa ruang-ruang musyawarah lokal menjadi landasan penting bagi tata kelola masyarakat yang kolaboratif, partisipatif, dan adil secara deliberatif.

Selain diskusi, praktik partisipatif juga terwujud secara konkret dalam kegiatan lapangan. Warga secara sukarela mengelola kebersihan, parkir, jalur wisata, dan penyambutan pengunjung dengan sistem giliran yang disepakati bersama. Tokoh masyarakat seperti Bapak Leman menjadi contoh utama dari partisipasi sosial ini. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Sekarang yang jaga di sana itu Bapak Leman. Dulu pas baru viral sekitar tiga tahunan, beliau ikut bantu jaga dan rawat tempat itu, dana retribusi tetap disetorkan ke kas lingkungan RT.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif juga mendorong keterlibatan generasi muda. Anak-anak muda desa mengelola parkir, membersihkan lokasi, serta mendukung promosi wisata secara digital. Generasi muda berperan sebagai jembatan antara kearifan lokal dan adaptasi teknologi, menjadikan mereka aktor strategis dalam memperkuat keberlanjutan pariwisata desa (Febrianti dan Suwondo 2022).

Kesadaran ekologis warga juga menjadi kekuatan yang memperkuat dimensi sosial partisipasi. Meskipun jumlah pengunjung meningkat, masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membiarkan kerusakan ekologis terjadi. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Ya tidak, Mas. Warga tidak protes. Di situ kan masyarakat sudah dewasa-dewasa. Jadi nggak ada yang merusak.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Rahmat, (2021) menjelaskan bahwa partisipasi berbasis kesadaran kolektif dan nilai lokal adalah bentuk partisipasi paling berkelanjutan karena tumbuh dari kesadaran, bukan dari insentif ekonomi.

Nilai sejarah dan spiritual kawasan air terjun juga memperkuat ikatan sosial warga dengan tempat tersebut. Sebelum menjadi destinasi wisata, kawasan ini dikenal sebagai belik atau sendang sumber air utama warga yang sarat nilai sakral dan historis. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Ya Sejarahnya Air Terjun Setatah, zaman dulu itu istilahnya Sendang atau juga belik, di atasnya air terjun Setatah itu kan ada beliknya besar dan ada batu besar ukuran truk. Asal mulanya dibuat ambil air minum warga, makanya dinamakan Air Terjun Setatah karena ‘ditatahi’.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan tempat ini tidak hanya dilandasi oleh potensi ekonomi, tetapi juga oleh penghormatan terhadap nilai-nilai warisan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Setatah telah menyentuh ranah nilai dan identitas kolektif masyarakat. Kombinasi antara

gotong royong material dan komitmen sosial menjadi fondasi dari pengelolaan wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ideal adalah pembangunan yang berbasis partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek, bukan objek kebijakan (Todaro dan Smith, 2011).

Berdasarkan teori *A Ladder of Citizen Participation* dari Sherry Arnstein, partisipasi masyarakat seperti yang terjadi di Air Terjun Setatah dapat dikategorikan dalam tingkat *Partnership*, yaitu tahap awal dari kategori *Citizen Power*. Dalam tahapan ini, warga tidak lagi hanya dilibatkan secara simbolik, melainkan mulai berperan sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan. *Partnership* ditandai oleh adanya akses terhadap informasi, ruang untuk menyuarakan pendapat, dan kemampuan untuk memengaruhi Keputusan melalui mekanisme sosial yang disepakati bersama (Arnstein, 1969).

Perkumpulan malam Jumat yang rutin dan terbuka menunjukkan bahwa warga memiliki ruang deliberatif yang aktif dan tidak dikuasai sepihak oleh tokoh lokal. Diskusi yang terjadi tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi benar-benar menjadi sarana warga untuk menentukan langkah pembangunan bersama. Praktik ini mencerminkan pola kemitraan horizontal sebagaimana ditekankan Arnstein di mana kekuasaan mulai terbagi antara otoritas informal (RT/tokoh) dan masyarakat umum.

Kemitraan ini juga terwujud dalam pengelolaan dana. Tidak ada dominasi personal dalam pengambilan keputusan, dan hasil dari kontribusi wisata dikelola secara kolektif berdasarkan keputusan bersama. Meski belum dilembagakan secara hukum (seperti dalam bentuk koperasi wisata atau BUMDes), pengelolaan yang bersandar pada musyawarah terbuka sudah menunjukkan ciri khas partisipasi bermakna dan berdaya.

Bentuk partisipasi masyarakat Air Terjun Setatah telah melewati tahap *tokenisme* (seperti konsultasi dan penenangan), dan mulai memasuki tahap awal *citizen power*. *Partnership* di sini tidak hanya menjadi simbol partisipasi, tetapi telah menjadi alat distribusi kekuasaan dalam skala masyarakat, yang menjamin bahwa suara warga bukan hanya didengar, tetapi turut menentukan arah kebijakan lokal.

B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dari kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi dari seberapa besar pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sherry Arnstein (1969) membagi partisipasi ke dalam delapan tingkat yang digambarkan sebagai sebuah tangga teori partisipasi *A ladder of citizen participation*. Delapan tingkat tersebut adalah: manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penenangan (*placation*), kemitraan (*partnership*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol warga (*citizen control*).

Setiap tangga mencerminkan seberapa besar akses dan kuasa masyarakat terhadap proses pembangunan, dari yang paling rendah (sekadar pelengkap) hingga yang tertinggi (pengambil kebijakan utama). Namun, dalam konteks penelitian ini, tidak semua tingkat partisipasi tersebut relevan secara empiris.

Berdasarkan analisis tingkat partisipasi masyarakat RT 10/RW 02 dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut paling tepat dianalisis melalui tiga tingkatan, yaitu:

1. *Placation* (Penenangan)

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata sudah mulai terlihat, namun belum menyentuh inti dari proses pengambilan keputusan. Masyarakat hanya dilibatkan setelah adanya inisiasi dari tokoh-tokoh tertentu seperti ketua RT, dan peran warga lebih banyak dalam bentuk tenaga kerja pada pelaksanaan teknis, bukan dalam tahap perencanaan atau evaluasi strategis.

Hal ini tergambar dari wawancara peneliti dengan Ketua RT 10/RW 02, Bapak Ahmad Tukul, mengatakan:

“Kalau ada kegiatan pembangunan, misalnya mau cor jalan atau bangun toilet, kami warga saling bantu. Tapi biasanya ya inisiatif dari Pak RT, beliau yang ngajak warga, terus kita ikut ramai-ramai bantu. Kita sudah biasa begitu, kalau dibilang gotong royong ya memang begitu caranya. Kadang kami rapat dulu, kadang langsung dikerjakan, tergantung kebutuhan. Tapi yang nunjuk dan ngatur biasanya dari pengurus, warga tinggal ngerjain bareng-bareng.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Gambar 10 Pembangunan Jalan Cor



Sumber: *Dokumentasi Desa Batealit*

Wawancara ini memperlihatkan bahwa pola keterlibatan warga masih sangat bergantung pada inisiatif dari tokoh lokal, dan belum mengarah pada pelibatan dalam tahapan konseptual perencanaan. Rapat warga lebih sering digunakan sebagai forum untuk mengorganisasi pelaksanaan teknis daripada ruang deliberasi kritis yang melibatkan wacana alternatif atau evaluasi arah pengelolaan wisata. Selain itu, tidak ditemukan adanya dokumentasi yang menunjukkan bahwa warga memiliki hak veto atau otoritas yang setara untuk menolak atau mengusulkan secara aktif arah pembangunan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu pemuda desa, Ahmad Faisal, yang sering dilibatkan dalam kegiatan kerja bakti:

“Kalau pemuda ya biasa disuruh bantu. Kayak bersihin jalan, bangun toilet, cor jalan setapak ke arah air terjun. Biasanya kami nggak nanya itu idenya siapa, pokoknya kalau sudah diputuskan RT ya kita jalanin. Kami anggap itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga. Tapi kami nggak pernah dimintai pendapat soal desain atau arah pengelolaan, itu urusan orang tua atau pengurus.”(Wawancara Ahmad Faisal, 2025)

Gambar 11 Pemuda Desa Gotong Royong Di Air Terjun Setatah



Sumber: *Dokumentasi Pemuda Desa Batealit*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa meskipun semangat kolektif dan gotong royong cukup kuat, namun warga muda tidak memiliki akses untuk turut serta dalam perumusan arah kebijakan atau pengelolaan. Mereka lebih berfungsi sebagai pelaksana kegiatan, bukan sebagai subjek pengambil kebijakan.

Ditinjau dari model *A Ladder of Citizen Participation* yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein. *Placation* merupakan tingkat ketiga dari kategori *tokenisme*. Di tahap ini, masyarakat memang sudah diberi ruang untuk berpartisipasi secara formal, namun kekuasaan yang diberikan masih bersifat terbatas dan simbolik. Masyarakat dapat menyuarakan pendapat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa pendapat mereka memengaruhi keputusan akhir (Arnstein, 1969).

Arnstein menyebut tingkatan ini sebagai bentuk "penenangan sosial", di mana keterlibatan warga digunakan sebagai alat legitimasi bagi penguasa lokal agar seolah-olah pembangunan bersifat partisipatif. Pada kenyataannya, keputusan telah ditentukan oleh segelintir individu yang memiliki akses informasi, pengaruh sosial, dan kekuasaan organisasi.

Konteks Air Terjun Setatah, model ini sangat relevan. Kegiatan pembangunan seperti pembuatan toilet, pengecoran jalan, dan pembersihan area wisata memang melibatkan warga, namun arah kebijakan seperti siapa yang mengelola, bagaimana pendapatan dibagi, atau rencana jangka panjang pengelolaan tidak secara terbuka dirancang bersama warga biasa. Sehingga, fungsi partisipasi lebih menyerupai keterlibatan teknis ketimbang kontrol substantif terhadap jalannya program. Lebih lanjut, dalam kerangka pemikiran Arnstein, bentuk *Placation* tidak dapat disebut sebagai bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya. Sebab, kendali kekuasaan belum berpindah ke tangan warga secara kolektif. Warga memang aktif, namun tidak berada dalam posisi mempengaruhi atau mengarahkan kebijakan publik secara bermakna.

2. *Partnership* (Kemitraan)

Tingkatan *partnership* dalam tangga partisipasi Sherry Arnstein mencerminkan fase ketika warga sudah tidak lagi hanya dijadikan pelaksana program, melainkan telah mulai diberdayakan secara kolektif untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kemitraan ini tidak berarti kekuasaan sepenuhnya

berpindah ke tangan masyarakat, tetapi menunjuk pada adanya pembagian kekuasaan secara fungsional antara pengelola dan warga, khususnya dalam bentuk mekanisme musyawarah yang terbuka dan inklusif.

Fenomena tersebut tergambar jelas dalam hasil wawancara dengan Ketua RT 10/RW 02 dan Kepala Desa Batealit:

“Setiap malam Jumat itu sudah jadi kebiasaan kami untuk kumpul warga. Biasanya kami bahas soal pengelolaan wisata, hasil pemasukan dari parkir, warung, kadang juga dari sumbangan. Misalnya mau bangun tangga baru, perbaiki jalan masuk, atau pasang papan petunjuk, itu dibahas bareng. Semua warga boleh kasih usul. Kami tidak memutuskan sendiri, karena ini menyangkut kepentingan bersama.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

“Saya sebagai kepala desa melihat bahwa masyarakat RT 10 ini sudah punya kesadaran kolektif. Mereka tidak hanya minta bantuan, tapi justru merencanakan sendiri. Kadang malah lebih rapi dari program desa. Mereka diskusi di forum malam Jumat, lalu hasilnya dilaporkan juga ke pihak desa. Jadi, pemerintah sifatnya mendukung dari belakang.” (Wawancara Ali Asikin, 2025)

Gambar 12 Musyawarah RT 10 RW 02 Batealit



Sumber: *Dokumentasi Desa Batealit*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan musyawarah rutin bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi forum yang aktif dalam membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Agenda yang dibahas mencakup kebutuhan fasilitas, pengelolaan dana, perbaikan infrastruktur, hingga pembagian kerja warga. Musyawarah ini tidak dipimpin secara *top-down*, melainkan terbuka terhadap kontribusi gagasan dari berbagai elemen Masyarakat baik dari tokoh adat, pemuda, maupun ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sekitar wisata.

Berdasarkan observasi peneliti, musyawarah malam Jumat tidak hanya dihadiri oleh kalangan pria dewasa, tetapi juga menghadirkan pemuda desa dan pelaku UMKM setempat. Hal ini mencerminkan keterbukaan proses pengambilan keputusan dan mulai munculnya kesetaraan suara dalam diskusi publik, meskipun tidak dalam bentuk struktur legal formal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Teori *A Ladder of Citizen Participation* yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein, *partnership* adalah titik awal dari kategori *citizen power* sebuah tahapan partisipasi substantif yang menjamin adanya distribusi kekuasaan antara masyarakat dan pihak berwenang. Menurut Arnstein, *partnership* hanya bisa terjadi ketika warga memiliki akses terhadap informasi, hak untuk menyampaikan pendapat dan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan melalui mekanisme formal maupun informal (Arnstein, 1969).

Konteks Desa Batealit, pengelolaan wisata Air Terjun Setatah sudah menampilkan karakteristik tersebut. Keputusan tidak hanya bersumber dari tokoh sentral seperti Ketua RT, tetapi dibentuk melalui musyawarah kolektif. Forum malam Jumat menjadi saluran deliberasi yang teratur, di mana partisipasi tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi telah menjelma menjadi bentuk kolaboratif. Prinsip transparansi keuangan, dengan melaporkan hasil kas parkir dan alokasi penggunaannya merupakan salah satu bukti adanya pertanggungjawaban publik, yang menjadi inti dari kemitraan sejati.

Namun demikian, *partnership* dalam kasus ini masih berada dalam ranah informal. Struktur kelembagaan belum diorganisasi dalam bentuk badan hukum seperti koperasi wisata atau BUMDes. Meskipun warga telah memiliki suara yang dihargai, mekanisme legal untuk menjamin partisipasi tersebut masih perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, *partnership* di sini masih bersifat *komunal-kultural*, bukan *institutional-legal*. Dalam pandangan Arnstein, *partnership* semacam ini merupakan tahap krusial yang menentukan apakah partisipasi akan berkembang ke arah yang lebih demokratis dan transformatif (*delegated power* atau *citizen control*), atau justru stagnan dalam bentuk *tokenisme* yang tersamarkan oleh praktik musyawarah yang masih dikontrol informal.

3. *Delegated Power (Pelimpahan Kekuasaan)*

Pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai mitra diskusi atau pelaksana teknis, tetapi sudah mengambil alih kendali operasional dan pengambilan keputusan secara substantif. Kekuasaan dalam mengelola sumber daya, menentukan alokasi pendapatan, dan merancang arah pembangunan dijalankan langsung oleh warga, bukan oleh aktor eksternal seperti pemerintah desa atau lembaga swasta.

Pelimpahan kekuasaan ini dapat ditelusuri melalui pernyataan Bapak Leman, salah satu pengelola wisata Air Terjun Setatah dan Bapak Ahmad Tukul, Ketua RT yang mengatakan:

“Saya punya lahan yang dipakai buat area parkir dan jalan masuk ke air terjun. Tapi semua hasil parkir itu bukan buat saya pribadi. Itu langsung masuk ke kas RT. Kami semua sepakat begitu dari awal. Dana itu nanti dipakai buat keperluan bersama, misalnya untuk kebersihan, bangun tempat ibadah, dan juga jaga keamanan. Nggak ada yang atur dari luar. Kami musyawarahkan sendiri, dan semua warga tahu penggunaannya. Bahkan kalau ada masalah, kami juga selesaikan sendiri lewat rapat.” (Wawancara Leman, 2025)

“Ya, semua yang masuk dari hasil parkir, kadang juga dari kontribusi warung, itu langsung kami rekap dan catat. Lalu saat rapat warga malam Jumat, kami sampaikan laporannya. Dari situ kita tentukan mau dipakai buat apa. Misalnya waktu itu warga minta dibelikan tempat sampah, ya langsung kita beli. Atau buat beli lampu penerangan. Semua berdasarkan kesepakatan, bukan dari saya sendiri sebagai RT.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Gambar 13 Pencatatan Kas RT Desa



Sumber: *Dokumentasi Desa Batealit*

Dari kedua pernyataan tersebut terlihat bahwa pengelolaan dana telah dilakukan secara mandiri, terbuka, dan melalui kesepakatan kolektif, tanpa dikendalikan pihak luar. Bahkan, peran pemerintah desa hanya sebatas memfasilitasi

dari kejauhan tanpa intervensi terhadap pengambilan keputusan. Ini menandakan bahwa masyarakat telah memiliki kekuatan otonom untuk mengatur pembangunan wisata berdasarkan nilai dan kebutuhan masyarakat lokal

Proses pengelolaan kawasan wisata Air Terjun Setatah, sumber pendanaan menjadi salah satu tantangan utama. Dana awal untuk pembangunan jalur akses, tempat parkir, dan toilet berasal sepenuhnya dari kas swadaya RT 10/RW 02. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, jumlah dana awal yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp 2 juta, yang bersumber dari iuran warga dan sumbangan sukarela masyarakat. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan dasar seperti semen, batu, kayu, dan perlengkapan bangunan lainnya.

Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada bantuan dana secara langsung dari pemerintah desa maupun instansi lain. Pemerintah desa sempat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan singkat tentang pengelolaan wisata berbasis komunitas, namun belum sampai pada tahap intervensi pendanaan. Hal ini terjadi karena status Air Terjun Setatah belum ditetapkan sebagai destinasi wisata resmi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, sehingga belum masuk dalam daftar program pengelolaan pariwisata daerah.

Demikian pula, belum ada keterlibatan dari pihak swasta atau perusahaan dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata ini. Seluruh pengelolaan masih bergantung pada gotong royong warga dan sistem donasi sukarela dari pengunjung. Situasi ini menegaskan bahwa pengelolaan wisata Air Terjun Setatah hingga saat ini benar-benar dijalankan secara mandiri oleh masyarakat tanpa sokongan institusional formal. Meskipun demikian, semangat kolektif yang tumbuh dari kesadaran bersama menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam menjaga keberlanjutan wisata tersebut..

Kerangka teori Arnstein, *Delegated Power* adalah tingkat partisipasi di mana masyarakat telah menerima pelimpahan otoritas untuk mengontrol satu atau lebih aspek pembangunan, termasuk dalam hal keuangan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kegiatan. Arnstein menekankan bahwa pada tahap ini, lembaga warga diberikan kekuasaan sah atau mengambalnya secara (*de facto*) untuk menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya dimonopoli oleh negara atau tokoh local (Arnstein, 1969).

Ciri utama dari *delegated power* adalah:

- a. Kekuasaan pengambilan keputusan tidak lagi simbolik, tetapi nyata dan dapat memengaruhi arah kebijakan.
- b. Tidak tergantung pada aktor eksternal, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
- c. Mekanisme kontrol dan pengawasan dijalankan oleh warga sendiri, berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Konteks RT 10/RW 02 Desa Batealit, pelimpahan kekuasaan tampak melalui praktik pengelolaan dana berbasis musyawarah, pengambilan keputusan tentang pembangunan fisik, serta penetapan prioritas penggunaan hasil retribusi tanpa harus menunggu arahan dari pihak luar. Bahkan tokoh seperti pemilik lahan pun menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan kolektif, bukan bertindak sebagai pemilik mutlak atau penyumbang dominan. Ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya memiliki suara, tetapi juga kendali.

Demikian bentuk *delegated power* di sini masih bersifat informal dan belum terlindungi secara hukum. Tidak terdapat lembaga resmi seperti Badan Usaha Milik Warga atau koperasi desa yang memiliki status legal untuk memayungi aktivitas tersebut. Maka, bentuk partisipasi ini dapat dikatakan sebagai *delegated power* berbasis masyarakat (*community-based delegated authority*), yang mengandalkan kekuatan nilai sosial, gotong royong, dan legitimasi lokal. Jika pola seperti ini terus dikuatkan dan dilembagakan, partisipasi masyarakat di Air Terjun Setatah memiliki peluang besar untuk mencapai tahap tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein, yakni *Citizen Control* dimana warga menjadi pemilik sah program dan pengambil keputusan utama dalam semua aspek pembangunan. Maka dari itu, *delegated power* yang saat ini bersifat sosial dapat berkembang menjadi kekuasaan warga yang sah secara administratif dan legal.

C. Peran Kelompok Sosial dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Setatah

Pengelolaan wisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan kelompok-kelompok sosial yang berfungsi sebagai penggerak, penghubung, serta penguat interaksi sosial antarwarga. Di Desa Batealit, terdapat beberapa kelompok sosial yang memiliki peran signifikan dalam mendukung keberlanjutan wisata Air Terjun

Setatah. Meskipun banyak dari kelompok ini tidak memiliki struktur formal, kontribusi mereka nyata dalam pengelolaan sehari-hari, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pembahasan berikut akan mengelompokkan peran-peran tersebut dalam subjudul agar lebih sistematis.

1. Kelompok Sosial Pemuda Desa sebagai Penggerak Operasional

Pemuda desa memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak dalam menjaga kelangsungan operasional wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit. Sebagai generasi yang dinamis dan penuh energi, pemuda terlibat langsung dalam berbagai aktivitas yang mendukung kelancaran kegiatan wisata di lokasi tersebut. Dalam konteks operasional, mereka bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan jalur menuju air terjun dengan membersihkan sampah, merapikan fasilitas jalan setapak, serta memastikan kenyamanan dan keamanan area wisata bagi pengunjung. Peran pemuda dalam pengelolaan lingkungan wisata sangat krusial untuk menjaga kelestarian dan kualitas destinasi wisata (Nurhayati dan Zainuddin, 2017).

Selain itu, pemuda desa juga berperan aktif dalam pengaturan parkir kendaraan yang merupakan tantangan tersendiri saat kunjungan wisatawan membludak. Keterlibatan mereka dalam mengatur arus kendaraan membantu menciptakan pengalaman wisata yang tertib dan nyaman bagi pengunjung. Tidak hanya berperan secara fisik, pemuda juga mendampingi pengunjung dengan memberikan informasi dan arahan terkait jalur menuju air terjun, sekaligus memastikan keselamatan wisatawan selama berada di lokasi. Peran ini menggambarkan fungsi sosial mereka sebagai fasilitator komunikasi antara masyarakat lokal dan pengunjung, sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Susanto, (2019) dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Faisal, seorang pemuda desa yang aktif terlibat dalam pengelolaan wisata, ia mengatakan:

“Kami yang muda-muda ini biasanya diminta bantu pas ramai pengunjung, kayak jaga parkir, kasih informasi ke tamu.”
(Wawancara Ahmad Faisal, 2025)

Gambar 14 Pemuda Desa Menjaga Motor Pengunjung



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

Pernyataan ini menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kesadaran kolektif di kalangan pemuda menjadi modal sosial penting dalam menjaga kelancaran aktivitas wisata sehari-hari. Penelitian oleh Putra dan Dewi, (2020) juga menguatkan bahwa keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan lingkungan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya wisata.

Kesadaran kolektif yang tumbuh dalam kelompok pemuda ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial yang kuat terhadap reputasi dan keberlanjutan kawasan wisata. Mereka mulai memahami bahwa menjaga citra desa sebagai tempat yang ramah dan menarik bagi pengunjung berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Siklus positif ini memperlihatkan bahwa generasi muda tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga sebagai penggerak kreatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan wisata, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat (Sutopo dan Ambarwati, 2021).

Jika dianalisis dengan pendekatan tangga partisipasi Sherry Arnstein, bentuk keterlibatan pemuda dalam konteks ini menunjukkan karakteristik *Placation*, yakni salah satu tahapan dari kategori *tokenisme*. Pada tingkatan ini, Masyarakat dalam hal ini para pemuda memang diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan wisata, namun keterlibatan tersebut terbatas pada pelaksanaan teknis dan operasional, bukan pada penentuan arah kebijakan atau pengambilan keputusan strategis (Arnstein, 1969).

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Faisal memperlihatkan bahwa partisipasi mereka bersifat instruktif, mereka diminta untuk membantu, bukan

diundang untuk merancang atau menentukan kebijakan. Posisi pemuda dalam struktur pengelolaan wisata cenderung sebagai pelaksana, bukan perencana. Hal ini sesuai dengan deskripsi Arnstein bahwa pada tahap *placation*, masyarakat tampak terlibat, namun pengaruh mereka terhadap keputusan bersifat terbatas. Keikutsertaan mereka seringkali digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap keputusan yang sudah dirancang oleh pihak tertentu.

Meski demikian, keterlibatan aktif dalam kegiatan operasional seperti parkir, pelayanan informasi, dan penjagaan kawasan tetap penting sebagai fondasi pembentukan kapasitas partisipatif masyarakat. Potensi ini, apabila diikuti dengan perluasan ruang diskusi dan keterlibatan dalam forum musyawarah strategis, dapat berkembang menuju tingkat partisipasi yang lebih tinggi seperti *partnership* atau bahkan *delegated power*. Dengan demikian, keberadaan pemuda sebagai aktor aktif dalam kegiatan sehari-hari wisata dapat menjadi titik awal perubahan struktur partisipasi yang lebih demokratis dan transformatif.

2. Kelompok Sosial Pedagang Lokal sebagai Pelaku Ekonomi dan Penjaga Lingkungan

Pedagang lokal yang menjalankan usaha di sekitar kawasan wisata Air Terjun Setatah merupakan salah satu kelompok sosial yang secara langsung merasakan dampak perkembangan pariwisata di Desa Batealit. Mereka berperan sebagai pelaku ekonomi utama yang tidak hanya mendukung jalannya aktivitas pariwisata, tetapi juga memperoleh manfaat signifikan dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan, khususnya saat akhir pekan dan musim liburan, berdampak pada peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Baik pedagang makanan ringan, minuman, souvenir, maupun jasa penyewaan peralatan wisata mengalami lonjakan omzet yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Shofiatun, seorang pedagang lokal yang aktif dalam pengelolaan kawasan wisata, mengatakan:

“Kalau pas hari libur atau akhir pekan, jualan saya bisa dua kali lipat dari hari biasa. Tapi saya juga ikut gotong royong tiap awal bulan, bersihin sampah-sampah, bantu siram tanaman. Karena kalau tempatnya kotor, yang rugi juga kita-kita yang jualan.”(Wawancara Shofiatun, 2025)

Gambar 15 Wawancara Dengan Pedagang di Air Terjun Setatah



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

Pernyataan ini menggambarkan betapa kuatnya kesadaran ekonomi di kalangan pedagang lokal yang berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, para pedagang juga secara aktif menunjukkan peran sebagai penjaga lingkungan kawasan wisata. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan pemahaman bahwa kebersihan dan kelestarian alam menjadi modal utama untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Banyak pedagang secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan, seperti membersihkan sampah di area wisata dan menyiram tanaman agar ekosistem tetap terjaga dengan baik.

Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Lestari dan Santoso, (2018) yang menyatakan bahwa pelibatan pedagang lokal dalam pengelolaan lingkungan wisata merupakan faktor kunci keberhasilan pelestarian kawasan wisata berbasis masyarakat. Selain itu, beberapa pedagang mengambil inisiatif mandiri dengan menyediakan fasilitas pendukung kebersihan, seperti menempatkan tempat sampah di lokasi strategis yang mudah diakses pengunjung. Mereka juga membuat tanda peringatan atau himbauan untuk mengajak wisatawan menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan sekitar. Upaya ini menunjukkan kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan wisata yang nyaman dan ramah bagi semua pihak. Inisiatif semacam ini penting untuk memperkuat kesadaran bersama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di kawasan wisata (Rahmawati dan Firmansyah, (2019).

Peran informal pedagang lokal juga sangat penting dalam menunjang pengalaman wisatawan. Sebagai warga yang tinggal dan beraktivitas langsung di sekitar lokasi, mereka seringkali menjadi penyambut pertama sekaligus pemandu tak resmi bagi pengunjung. Dengan pengetahuan lokal dan pengalaman, mereka memberikan arahan terkait lokasi parkir yang aman, jalur terbaik menuju air terjun, serta informasi terkait fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, pedagang lokal bukan hanya berfungsi sebagai penjual barang dan jasa, melainkan juga sebagai bagian dari sistem layanan yang meningkatkan kualitas pengalaman dan kenyamanan pengunjung. Pentingnya peran warga lokal, termasuk pelaku usaha mikro, dalam mendukung pelayanan pariwisata berbasis Masyarakat (Nugroho dan Wulandari, 2020).

Jika dianalisis melalui teori tangga partisipasi Sherry Arnstein, peran pedagang lokal seperti yang ditunjukkan oleh Shofiatun mencerminkan bentuk partisipasi pada tingkat *Partnership*. Pada tingkatan ini, warga tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan teknis atau pelaksanaan, tetapi sudah mulai berposisi sebagai mitra dalam pengelolaan dan keberlanjutan wisata, meskipun secara struktural belum terorganisasi dalam bentuk kelembagaan formal (Arnstein, 1969).

Pedagang tidak sekadar berdagang, tetapi juga mengambil inisiatif kolektif seperti ikut gotong royong, menyediakan tempat sampah, hingga membuat himbauan kepada pengunjung. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap kualitas layanan dan kelestarian lingkungan, serta memahami bahwa keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada kenyamanan dan kebersihan destinasi wisata.

Model *Partnership*, seperti dijelaskan Arnstein, terdapat pembagian kekuasaan antara warga dan pengelola formal. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada sistem administrasi resmi seperti koperasi atau forum ekonomi desa, peran dan suara pedagang lokal sangat menentukan dalam praktik keseharian. Mereka menjadi pelaku yang memengaruhi kebijakan informal, terutama dalam menjaga standar layanan dan kualitas ekosistem wisata secara langsung.

Pedagang lokal di kawasan Air Terjun Setatah telah melampaui fase *tokenisme* dan mulai menunjukkan bentuk kemitraan sejajar yang penting dalam keberlanjutan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi mereka

tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi elemen esensial dalam sistem pengelolaan pariwisata yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

3. Kelompok Sosial Tokoh Masyarakat sebagai Penjaga Stabilitas Sosial dan Pengarah Kebijakan Informal

Tokoh masyarakat, yang dalam konteks ini diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), memegang peranan sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial serta mengarahkan kebijakan informal dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit. Meskipun kontribusi mereka tidak selalu terlihat dalam aktivitas operasional harian, peran mereka amat krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keharmonisan masyarakat secara menyeluruh. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Kami para tokoh diminta untuk ikut mengawal keputusan warga. Jadi kalau ada usulan, tidak langsung disetujui. Kita bahas dulu, timbang baik buruknya. Kadang kami jadi juru damai, kadang juga jadi penegas aturan. Tapi semuanya atas dasar musyawarah, bukan paksaan. Kalau tidak ada kesepakatan, pembangunan tidak jalan.”
(Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tokoh masyarakat dalam hal ini Ahmad Tukul telah menjalankan fungsi substantif sebagai pengendali kebijakan lokal, bukan sekadar simbol administratif. Beliau tidak hanya memediasi konflik dan memfasilitasi diskusi, tetapi juga menjadi penjaga legitimasi musyawarah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam perspektif Sherry Arnstein (1969), peran seperti ini menggambarkan tingkat partisipasi *Delegated Power*, yaitu kondisi ketika masyarakat telah memperoleh atau diberi pelimpahan kewenangan nyata untuk mengelola program, kebijakan, atau sumber daya secara mandiri.

Arnstein menekankan bahwa pada tingkat ini, keputusan tidak lagi datang dari atas (*top-down*), melainkan dari dalam masyarakat sendiri. Warga tidak hanya dimintai pendapat, tetapi telah memiliki kemampuan dan hak untuk mengarahkan kebijakan, serta memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan kolektif. Ketua RT seperti Ahmad Tukul berfungsi bukan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai fasilitator demokrasi lokal berbasis musyawarah, yang menjembatani aspirasi warga dalam kerangka kesepakatan bersama.

Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, Ahmad Tukul memiliki kewenangan moral dan sosial untuk menyatukan aspirasi warga, yang pada beberapa kesempatan dapat menimbulkan konflik. Ia berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa seputar pengelolaan kawasan wisata, termasuk soal penggunaan lahan, distribusi hasil ekonomi, maupun pelaksanaan aturan pelestarian lingkungan. Pendekatan musyawarah mufakat yang dikedepankan menjadi bentuk khas demokrasi lokal berbasis budaya (Prasetyo dan Hidayat, 2019).

Selain sebagai mediator, Ahmad Tukul juga menjadi pengarah dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah warga. Kegiatan seperti pembersihan lingkungan, perbaikan fasilitas umum, serta perencanaan kegiatan wisata dijalankan berdasarkan koordinasi yang beliau arahkan bersama warga. Perkumpulan malam Jumat warga yang rutin digelar menjadi wahana utama untuk menyerap aspirasi, menyampaikan laporan kas, serta menentukan arah pembangunan wisata secara terbuka. Di dalam forum tersebut, setiap suara warga dianggap penting, dan keputusan ditentukan bukan berdasarkan posisi struktural, tetapi pada kekuatan argumen dan mufakat (Wijayanti dkk., 2020).

Ahmad Tukul, Ketua RT 10/RW02 Desa Batealit, mengatakan:

“Setiap malam Jumat itu kita kumpul bareng, bahas pemasukan dari parkir, keluhan pengunjung, atau rencana bangun fasilitas. Saya bukan yang mutusin sendiri, saya cuma memimpin rapatnya. Keputusannya tetap bareng-bareng warga.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa kekuasaan dalam pengambilan keputusan telah terdistribusi di kalangan masyarakat secara horizontal, bukan terpusat pada satu pihak. Dalam teori Arnstein, model seperti ini menjadi indikator bahwa warga telah melampaui fase *tokenism* dan bahkan *partnership*, menuju pada bentuk *delegated power* di mana keputusan-keputusan strategis bersumber dari kehendak kolektif yang difasilitasi tokoh lokal, bukan ditentukan oleh pihak luar.

Tokoh masyarakat seperti Ahmad Tukul tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga sebagai penjaga konsensus sosial, pengarah etika masyarakat, dan penggerak dinamika kolektif. Kekuasaannya lahir bukan dari regulasi formal pemerintah, melainkan dari legitimasi budaya, kepercayaan sosial, dan rekam jejak pelayanan masyarakat.

Keberadaan tokoh masyarakat dalam posisi ini menjadi jembatan penting yang menghubungkan kelompok-kelompok lain seperti pemuda dan pedagang. Beliau berperan menjaga keseimbangan kepentingan antar kelompok, menegakkan norma sosial, serta menjamin bahwa pengelolaan wisata tetap selaras dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi. Dalam konteks pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, model partisipatif yang dijalankan melalui peran tokoh masyarakat seperti ini menciptakan fondasi sosial yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan (Hidayat dan Purwanto, 2021).

BAB V
DAMPAK PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN WISATA AIR TERJUN SETATAH

A. Dampak Sosial Partisipasi Masyarakat Desa Batealit dalam Pengelolaan Wisata
1. Penguatan Struktur Sosial melalui Partisipasi Masyarakat Desa Batealit dalam Pengelolaan Wisata

Partisipasi aktif masyarakat Desa Batealit dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah tidak hanya membawa perubahan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat setempat. Dampak sosial ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi sosial, tumbuhnya semangat gotong royong, penguatan interaksi antarwarga, hingga terbentuknya masyarakat kolektif sebagai pelaku pengelolaan wisata. Keterlibatan langsung warga dalam proses pembangunan membuka ruang bagi nilai-nilai sosial yang selama ini melekat dalam budaya lokal, namun belum terekspos secara optimal melalui kegiatan nyata.

Salah satu dampak sosial yang paling menonjol adalah kebangkitan kembali semangat gotong royong sebagai mekanisme utama dalam pembangunan dan pemeliharaan kawasan wisata. Kegiatan seperti pembersihan jalur menuju air terjun, perbaikan jalan setapak, serta pembangunan fasilitas umum seperti tempat duduk dan tempat sampah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Leman, mengatakan:

“Kalau ada rencana kerja bakti, ya semua turun tangan. Mulai dari anak muda sampai orang tua. Kami anggap ini bukan cuma wisata, tapi juga kebanggaan kampung.” (Wawancara Leman, 2025)

Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong ini mencerminkan kemunculan partisipasi simbolik yang kuat. Dalam teori Sherry Arnstein (1969), kegiatan seperti ini seringkali diasosiasikan dengan tingkat Placation, di mana warga dilibatkan secara aktif namun masih dalam kerangka pelaksanaan, bukan pengambilan keputusan. Namun, dalam konteks Air Terjun Setatah, gotong royong tidak hanya sekadar pelaksanaan teknis. Pernyataan Leman menunjukkan

bahwa ada rasa kepemilikan dan kebanggaan kolektif yang mendorong keterlibatan sukarela. Ini berarti, partisipasi mulai bergeser menuju *Partnership*, yakni saat warga merasa memiliki ruang untuk berkontribusi sekaligus menjadi bagian dari pengelola destinasi wisata, meskipun secara struktural belum sepenuhnya formal.

Semangat gotong royong yang selama ini muncul dalam acara adat seperti hajatan atau bersih desa kini menemukan ruang baru dalam kegiatan pengelolaan wisata. Fenomena ini menunjukkan revitalisasi nilai-nilai sosial yang memperkuat ikatan antarwarga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap ruang publik bersama (Haryanto dan Saputra, 2021).

Selain gotong royong, terjadi pula peningkatan partisipasi sosial yang ditandai dengan tumbuhnya rasa kebersamaan dan keterikatan emosional antaranggota masyarakat. Dalam setiap musyawarah dan kegiatan pengelolaan wisata, warga dari berbagai latar belakang aktif berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan rencana bersama. Interaksi sosial ini mempererat hubungan yang sebelumnya cenderung apatis terhadap lingkungan sekitar. Ahmad Faisal, mengatakan:

“Sejak Setatah dibuka buat umum, kami jadi sering kumpul, ngobrol, dan kerja bareng. Sekarang kayak lebih akrab antarwarga, walau beda RT.” (Wawancara Ahmad Faisal, 2025)

Pernyataan Ahmad Faisal mengindikasikan bahwa proses pembangunan wisata telah menciptakan ruang interaksi sosial yang bersifat inklusif dan lintas batas masyarakat, sebuah ciri khas dari tingkat partisipasi *Partnership* dalam model Arnstein. Di tahap ini, warga tidak hanya diikutsertakan, tetapi ikut menentukan arah kegiatan secara bersama, melalui interaksi sosial yang terbuka. Forum-forum musyawarah bukan lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi arena pengambilan keputusan bersama yang memperkuat integrasi sosial masyarakat. Kesetaraan partisipasi antarwarga yang dibangun dari intensitas pertemuan dan kerja kolektif menunjukkan bahwa kekuatan sosial masyarakat telah mengarah pada bentuk *citizen power* awal.

Penguatan partisipasi sosial ini melahirkan kebersamaan yang melampaui batas keluarga maupun kelompok kecil. Warga menjadi lebih peduli satu sama

lain, terutama ketika menghadapi tantangan seperti banjir kecil atau kerusakan jalur akibat cuaca buruk. Kebersamaan seperti ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat (Rahmawati dan Nugroho, 2019).

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga membentuk identitas kolektif baru bagi Desa Batealit sebagai desa wisata yang aktif dan mandiri. Hal ini tercermin dari cara warga memperkenalkan desanya dengan bangga kepada tamu atau pihak luar desa. Ahmad Faisal, mengatakan:

“Sekarang kalau ada orang luar desa datang, kami senang cerita soal Setatah. Rasanya kayak punya sesuatu yang bisa dibanggakan.”
(Wawancara Ahmad Faisal, 2025)

Identitas kolektif yang terbentuk dari bawah (*bottom-up*) dan perasaan memiliki terhadap keberhasilan wisata adalah indikator awal dari tingkat partisipasi *Delegated Power* dalam teori Arnstein. Ketika warga mulai menyadari bahwa keberhasilan wisata adalah hasil jerih payah bersama, dan bahwa mereka memiliki hak untuk membicarakan serta mempresentasikan keberhasilan tersebut, maka mekanisme kontrol dan arah pembangunan telah bergeser ke tangan warga itu sendiri. Ini menandakan awal dari pelimpahan kekuasaan yang lebih besar, bukan sekadar partisipasi teknis.

Namun demikian, tidak semua warga terlibat secara aktif. Sebagian masih merasa terpinggirkan. Perbedaan motivasi, tingkat pendidikan, dan kepentingan individu kerap memicu ketegangan kecil dalam dinamika sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sosial dan pendidikan partisipatif menjadi hal yang penting agar dampak sosial tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat (Sari dan Wibowo, 2020).

2. Perubahan Sosial dan Tantangan dalam Pengelolaan Wisata Desa Batealit

Pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit memberikan dampak sosial yang tidak hanya memperkuat nilai gotong royong dan semangat kolektivitas warga, tetapi juga memunculkan perubahan sosial yang cukup kompleks. Perubahan ini mencakup pergeseran struktur sosial serta peran kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang dominan, seperti perempuan dan pemuda, menjadi aktor yang berkontribusi aktif dalam dinamika sosial yang lebih

inklusif. Namun demikian, bersamaan dengan terbukanya peluang baru, muncul pula berbagai tantangan sosial yang harus direspons secara adaptif agar pengelolaan wisata ini dapat berlangsung berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wisata yang tumbuh dari inisiatif warga membuka ruang partisipasi sosial yang lebih luas. Kelompok yang selama ini kurang terlibat dalam pengambilan Keputusan terutama perempuan dan pemuda kini lebih aktif dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, serta pelaksanaan agenda pengelolaan wisata. Partisipasi perempuan, misalnya, terlihat dalam sektor pendukung seperti kuliner, kerajinan lokal, serta layanan kebersihan dan pelayanan wisatawan. Hal ini tidak hanya memperkuat dimensi sosial, tetapi juga meningkatkan ekonomi keluarga.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Fitriani, (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan desa wisata membawa dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan turut mendorong pergeseran peran gender dari tradisional ke arah yang lebih progresif. Perempuan tidak lagi hanya mengurus sektor domestik, tetapi ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa.

Namun, perkembangan ini belum dirasakan secara merata oleh semua warga. Masih terdapat kelompok yang mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi, sumber daya, maupun peluang ekonomi. Biasanya kelompok ini berasal dari warga usia lanjut, tingkat pendidikan rendah, atau tidak memiliki jaringan sosial yang kuat. Kondisi seperti ini berisiko memunculkan kecemburuan sosial, bahkan konflik, apabila tidak dikelola secara adil dan inklusif (Putri dan Santoso, 2018).

Perbedaan dalam hal literasi digital juga menjadi faktor pembeda. Kelompok pemuda yang akrab dengan teknologi memanfaatkan media sosial untuk promosi wisata, mengembangkan usaha digital seperti jasa fotografi, sewa perlengkapan, hingga layanan daring lainnya. Sebaliknya, warga yang tidak memiliki akses atau kemampuan digital cenderung tertinggal dan kurang mampu bersaing, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi antarwarga.

Di sisi lain, tata kelola wisata Air Terjun Setatah juga dipengaruhi oleh kekuatan informal, khususnya yang dimiliki oleh tokoh masyarakat dan tokoh

agama. Figur-figur ini memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di mata warga, sehingga sering menjadi aktor kunci dalam pengambilan keputusan penting baik dalam forum musyawarah maupun dalam penyelesaian sengketa sosial yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Ahmad Tukul, mengatakan:

“Saya tidak kerja sendiri, tapi saya berusaha menjaga agar semua usulan warga bisa ditampung. Kadang ada yang ingin buka warung baru, ada yang usul pasang penerangan tambahan. Semua itu kami bahas di rapat malam Jumat. Tapi saya pastikan tidak ada yang merasa dianaktirikan. Saya hanya menjembatani yang memutuskan tetap warga bersama-sama.” (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Berdasarkan wawancara di atas menggambarkan posisi tokoh masyarakat sebagai fasilitator dalam proses musyawarah desa. Dalam kerangka teori Sherry Arnstein yang membagi partisipasi ke dalam delapan tingkat, situasi seperti ini menunjukkan spektrum partisipasi masyarakat yang beragam.

Keterlibatan pemuda yang kini mulai dilibatkan dalam pertemuan dan kegiatan strategis mencerminkan peningkatan dari level simbolik *Placation* menuju *Partnership*. Dalam *Placation*, warga dilibatkan secara terbatas, umumnya hanya untuk memberi pendapat, tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan. Namun dalam *Partnership*, mereka mulai terlibat aktif sebagai mitra yang memiliki kekuatan tawar dalam forum pengambilan keputusan. Ini terlihat dari adanya forum musyawarah terbuka dan kebiasaan diskusi kolektif sebelum pembangunan dilakukan.

Sementara itu, posisi tokoh seperti Ahmad Tukul sebagai jembatan antarkelompok warga merupakan bentuk dari *Delegated Power*, yaitu ketika otoritas informal diakui dan dijalankan oleh tokoh lokal yang dipercaya masyarakat. Dalam konsep Arnstein, *Delegated Power* merupakan tahap di mana warga memiliki kontrol nyata dalam pengambilan keputusan dan menjalankan program meskipun tidak secara formal dilembagakan. Mekanisme musyawarah warga yang dipimpin tokoh masyarakat menjadi ruang deliberasi substantif yang mencerminkan adanya distribusi kekuasaan secara sosial.

Namun demikian, sebagaimana diperingatkan oleh Yuliani, (2019) delegasi kekuasaan informal tanpa mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang kuat dapat memunculkan risiko. Ketidadaan dokumentasi keputusan, tidak adanya

pelaporan keuangan terbuka, dan dominasi satu suara atas kelompok tertentu bisa membuat kekuasaan informal berpotensi menjadi bentuk baru dari eksklusivitas sosial. Dalam konteks ini, *Delegated Power* bisa bergeser menjadi kontrol elit, jika tidak dijaga oleh prinsip inklusivitas dan evaluasi kolektif yang terbuka.

B. Dampak Ekonomi dari Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata

Partisipasi masyarakat Desa Batealit dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan ekonomi warga. Kegiatan wisata yang semula hanya dipandang sebagai hiburan lokal, kini berkembang menjadi sektor ekonomi alternatif yang menjanjikan. Melalui keterlibatan langsung warga dalam pengelolaan, pelayanan, dan penataan kawasan wisata, terbuka berbagai peluang usaha yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.

1. Tumbuhnya Usaha Mikro dan Aktivitas Ekonomi masyarakat

Salah satu dampak paling nyata dari pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit adalah munculnya aktivitas ekonomi mikro yang tumbuh secara organik dari inisiatif warga. Warga mulai membuka warung makanan, menyewakan perlengkapan wisata, hingga menjual produk-produk lokal kepada pengunjung. Aktivitas ini memberikan dampak ekonomi langsung, terutama bagi kelompok perempuan dan pemuda yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap penghasilan tetap.

Menurut penuturan Ibu Shofiatun, salah satu pedagang lokal sekaligus warga aktif dalam kegiatan sosial di kawasan wisata:

“Semenjak Setatah ramai, banyak warga yang bisa jualan. Dulu sepi, sekarang kalau hari Minggu ramai. Ibu-ibu bikin makanan, anak-anak muda buka parkir, semua kebagian.” (Wawancara Shofiatun, 2025)

Gambar 16 Pedagang di Area Wisata Air terjun Setatah



Sumber: Dokumentasi dari peneliti

Aktivitas ekonomi ini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dalam bentuk kerja sama kolektif antarwarga. Di beberapa titik, warga membentuk kelompok kerja untuk mengatur giliran jaga, pengumpulan retribusi, dan pengelolaan dana masuk dari kontribusi pengunjung. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, dan penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pengajian dan kerja bakti. Shofiatun, mengatakan:

“Kalau ada acara atau banyak pengunjung, saya bawa gorengan, keripik, kopi. Bisa laku, kadang habis. Hasilnya ya buat tambahan belanja. Kami juga dapat bagian dari kas kalau ada kebutuhan mendesak.” (Wawancara Shofiatun, 2025)

Dampak ekonomi juga terasa pada kalangan pemuda. Mereka yang sebelumnya menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap, kini memiliki peran dalam pengelolaan wisata, terutama pada aspek teknis seperti pengaturan parkir, kebersihan, dan keamanan. Shofiatun, mengatakan:

“Anak-anak muda sekarang punya kerjaan walau sementara. Jaga parkir, bantu bersih-bersih. Dulu ya nganggur, nongkrong saja.” (Wawancara Shofiatun, 2025)

Gambar 17 Area Parkir Air Terjun Setatah



Sumber: Dokumentasi dari peneliti

Partisipasi ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif dan keterikatan sosial antarwarga, yang menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Fenomena keterlibatan warga dalam aktivitas ekonomi mikro dan sistem gotong royong pengelolaan kawasan wisata dapat dijelaskan melalui teori *A Ladder of Citizen Participation* oleh Sherry Arnstein. Dalam konteks ini, peran warga menunjukkan karakteristik *Partnership*, bahkan dalam beberapa aspek sudah mulai mendekati *Delegated Power*.

Pada tahap *Partnership*, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pelaksana atau simbol keterlibatan (*tokenisme*), tetapi mulai menjalankan peran sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kegiatan seperti pengumpulan dana retribusi, pengaturan jadwal kerja, serta penggunaan kas secara kolektif menggambarkan bahwa kekuasaan dalam pengelolaan telah didistribusikan lebih merata dan terbuka.

Sementara itu, fakta bahwa pendapatan dari pengunjung dikelola sendiri oleh Masyarakat dan disalurkan kembali untuk kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan dan dana darurat menunjukkan adanya kontrol yang cukup besar atas sumber daya dan kebijakan internal. Ini merupakan bentuk awal dari *Delegated Power*, yaitu ketika kekuasaan telah dipercayakan sepenuhnya kepada warga untuk mengelola urusan lokal secara otonom dan bertanggung jawab, tanpa campur tangan langsung dari pihak eksternal seperti pemerintah desa atau pihak ketiga.

Namun demikian, agar bentuk partisipasi ini benar-benar naik kelas menjadi *citizen power* yang berkelanjutan, diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan. Misalnya dengan membentuk kelompok usaha resmi (koperasi atau BUMDes), membuat sistem akuntabilitas tertulis, serta menjamin adanya pelaporan keuangan secara berkala. Dengan cara ini, sistem yang telah berjalan secara sosial bisa diperkuat secara administratif dan legal.

2. Tantangan Akses, Modal, dan Tata Kelola Ekonomi

Meski pengelolaan wisata Air Terjun Setatah memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Batealit, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga. Salah satu kelompok yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi adalah ibu rumah tangga, khususnya yang tidak memiliki keterampilan khusus atau modal awal untuk memulai usaha. Banyak dari mereka belum terlibat karena keterbatasan sarana produksi, informasi pemasaran, serta dukungan teknis.

Sebagian ibu rumah tangga, misalnya, belum mengetahui cara memasarkan produk olahan secara efektif melalui media sosial atau jaringan luar desa. Sebagian lainnya tidak memiliki alat produksi seperti kompor gas besar, penggiling, atau pengemas produk, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses pengetahuan, teknologi, dan permodalan, yang dapat menghambat potensi partisipasi ekonomi secara inklusif.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, serta fasilitasi akses permodalan dari pemerintah desa maupun lembaga mitra pembangunan. Dengan adanya program pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan kelompok-kelompok yang belum tersentuh bisa terdorong untuk aktif mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi berbasis pariwisata.

Selain aspek ekonomi individu, sistem pengelolaan dana masyarakat juga masih menghadapi tantangan dari sisi transparansi dan manajemen keuangan. Menurut keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yang juga terlibat dalam pengelolaan wisata, pencatatan dana retribusi masih dilakukan secara manual dan belum terdokumentasi secara sistematis. Leman, mengatakan:

“Uang retribusi ya dicatat biasa saja, ditulis di buku. Kalau ada sisa atau kelebihan, kami musyawarahkan. Tapi ya kadang lupa dilaporkan secara rinci.” (Wawancara Leman, 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun sistem kas RT telah berjalan dengan prinsip keterbukaan, mekanisme pelaporan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Belum semua warga memahami pentingnya dokumentasi yang rapi dan pencatatan keuangan yang transparan sebagai dasar kepercayaan dan legitimasi kolektif.

Namun di sisi lain, pengalaman ini secara tidak langsung telah menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya manajemen usaha bersama dan tanggung jawab sosial atas penggunaan dana publik. Semangat gotong royong yang telah melekat menjadi modal sosial yang kuat untuk mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi yang lebih mapan, seperti koperasi desa atau kelompok usaha bersama (KUB) yang berbasis prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi.

Situasi ini dapat dianalisis melalui lensa teori partisipasi Sherry Arnstein. Ketika warga mulai terlibat dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan secara musyawarah, namun belum memiliki sistem pelaporan dan struktur kelembagaan formal, maka mereka sedang berada pada tahap transisi dari Partnership menuju Delegated Power.

Pada tingkat Partnership, masyarakat menjadi mitra sejajar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditunjukkan dalam forum musyawarah warga dan pengelolaan dana kas yang diputuskan bersama. Namun, karena belum terdapat sistem akuntansi atau tata kelola keuangan yang terdokumentasi dengan baik, maka mekanisme partisipasi masih terbatas pada norma sosial dan kepercayaan antarwarga.

Mencapai *Delegated Power*, yaitu ketika masyarakat tidak hanya memiliki suara tetapi juga kendali substantif dan sistematis terhadap sumber daya dan kebijakan lokal, diperlukan penguatan dari sisi manajerial. Dalam kerangka Arnstein, *delegated power* dicapai ketika warga mampu mengelola program secara independen dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat secara kolektif baik melalui laporan terbuka, pemilihan perwakilan pengelola, maupun lembaga legal seperti koperasi.

Konteks ini, Desa Batealit telah menunjukkan kemajuan partisipatif yang signifikan, tetapi masih memerlukan dorongan dalam bentuk pelatihan manajemen, pencatatan keuangan digital, serta pendampingan kelembagaan agar sistem kas RT yang berjalan dapat bertransformasi menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang sah, kuat, dan berkelanjutan.

C. Dampak Partisipasi terhadap Kemandirian Masyarakat Desa Batealit

Partisipasi masyarakat Desa Batealit dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah tidak hanya memberikan dampak ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian masyarakat. Kemandirian ini merujuk pada kemampuan warga untuk mengambil keputusan secara mandiri, mengelola potensi lokal tanpa ketergantungan terhadap pihak eksternal, serta memelihara tanggung jawab kolektif terhadap sumber daya yang dimiliki. Dalam kerangka teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), partisipasi warga Batealit menunjukkan posisi yang berada pada tahap "*partnership*" menuju "*delegated power*", di mana masyarakat tidak sekadar diikutsertakan, tetapi sudah memiliki kontrol langsung terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan lokal.

1. Musyawarah dan Kepemimpinan Bersama

Kemandirian masyarakat tampak jelas dalam praktik pengambilan keputusan berbasis musyawarah. Perkumpulan malam Jumat menjadi ruang deliberatif utama dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan wisata. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi tingkat tinggi dalam teori Arnstein, yaitu "*delegated power*", di mana warga memiliki pengaruh substantif terhadap keputusan yang diambil.

"Kami itu biasa rapat malam Jumat. Semua bisa bicara, tapi keputusan ya tetap dilihat dari manfaat untuk bersama. Kadang ada beda pendapat, tapi ujungnya mufakat." (Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Musyawarah tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan dijalankan dengan semangat mufakat. Namun, refleksi terhadap praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dominasi oleh kelompok tertentu yakni tokoh-tokoh masyarakat yang lebih senior atau aktif di organisasi. Hal ini sejalan dengan kritik Arnstein tentang tahapan partisipasi semu di tingkat "*consultation*",

di mana keterbukaan formal ada, tetapi pengaruh nyata terhadap keputusan hanya dimiliki sebagian pihak. Ahmad Tukul, mengatakan:

"Memang rapat terbuka, tapi yang sering bicara ya orang-orang yang biasa aktif. Yang muda-muda kadang cuma duduk dengar."
(Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Meskipun masyarakat telah mencapai tingkat *delegated power* secara institusional, secara kultural partisipasi masih bercampur dengan elemen tokenisme yaitu keterlibatan simbolik dari kelompok marjinal yang belum sepenuhnya memiliki daya tawar.

Selain dari sisi musyawarah, praktik pembentukan tim-tim kerja untuk pengelolaan parkir, kebersihan, dan keamanan juga menunjukkan kepemimpinan kolektif yang khas dalam masyarakat berbasis gotong royong. Tidak ada struktur formal dari luar yang mengatur, dan fungsi-fungsi manajerial dijalankan secara spontan oleh warga.

Dana retribusi yang diperoleh dari pengunjung dikelola secara transparan untuk membiayai infrastruktur dan kegiatan sosial. Ahmad Tukul, mengatakan:

"Kalau uang dari wisata itu ya kami pakai buat yang perlu-perlu saja. Misalnya perbaiki jalan ke air terjun, beli tong sampah, atau perlengkapan gotong royong. Semua tahu penggunaannya."
(Wawancara Ahmad Tukul, 2025)

Hal ini mengindikasikan bahwa kendali terhadap sumber daya lokal telah berada di tangan warga, yang sejalan dengan tahap "*citizen control*" menurut Arnstein, (1969) yaitu kondisi ideal ketika masyarakat sepenuhnya mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan.

Namun, masih terdapat keterbatasan dalam aspek kelembagaan. Ahmad Faisal, mengatakan:

"Sekarang ini yang ngatur ya teman-teman yang dulu bikin awal. Belum ada semacam struktur resmi, tapi semua sudah tahu tugas masing-masing." (Wawancara Ahmad Faisal, 2025)

Ketiadaan struktur formal membuat partisipasi ini tetap rentan terhadap perubahan figur, tidak memiliki sistem regenerasi, dan cenderung informal. Ini

menunjukkan bahwa tahapan “*citizen control*” belum sepenuhnya terlembagakan dan masih membutuhkan penguatan dari segi kelembagaan masyarakat.

2. Pendidikan Partisipasi dan Jejaring Sosial

Memperkuat keberlanjutan kemandirian masyarakat, penting untuk membangun pendidikan partisipatif di kalangan generasi muda. Leman menekankan pentingnya pelibatan anak muda. Leman, mengatakan:

"Kami libatkan anak-anak muda supaya belajar. Jangan semua diserahkan ke orang tua. Nanti kalau sudah tua-tua gak bisa kerja, siapa yang terusin?" (Wawancara Leman, 2025)

Namun kenyataannya, banyak pemuda yang belum aktif bersuara dalam forum musyawarah. Hal ini mencerminkan masih adanya kendala kultural yang menghambat kesetaraan partisipasi, sebagaimana dikritik Arnstein, (1969) pada tahapan *tokenisme* di mana partisipasi secara simbolik dibuka, tetapi belum menjamin kekuatan suara yang setara di semua kalangan.

Pendidikan partisipatif yang berkelanjutan dibutuhkan agar masyarakat tidak hanya hadir dalam forum, tetapi juga mampu berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan mengambil inisiatif. Pendidikan ini juga penting untuk menghindari stagnasi partisipasi akibat dominasi kelompok senior.

Di sisi lain, meskipun masyarakat menunjukkan kapasitas internal yang kuat, jejaring eksternal belum banyak dimanfaatkan. Kemandirian yang dimiliki masih bersifat lokal dan cenderung tertutup dari jaringan kolaborasi lintas desa atau lembaga. Padahal, Arnstein menekankan bahwa partisipasi warga akan semakin kuat ketika didukung oleh akses terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya dari luar.

Model partisipasi yang berkembang di Batealit sebenarnya sudah menunjukkan bahwa warga mampu mengelola destinasi secara mandiri. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan distribusi kekuasaan yang adil, perlu transisi dari pola partisipasi informal menuju bentuk yang terstruktur dan lebih representatif.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah di Desa Batealit, Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga RT 10/RW 02 menunjukkan bentuk partisipasi aktif dalam aspek pelaksanaan, seperti pembangunan infrastruktur wisata melalui gotong royong, kerja bakti, serta pengelolaan fasilitas dasar seperti warung, area parkir, dan toilet umum. Masyarakat juga mulai menunjukkan keterbukaan sosial terhadap wisatawan dan mengalami transformasi ekonomi dari ketergantungan pertanian ke sektor pariwisata. Partisipasi masyarakat sebagian besar masih berada pada tahap *tokenisme* dalam teori Sherry Arnstein, karena keputusan strategis masih didominasi oleh tokoh tertentu, seperti ketua RT. Untuk mencapai *citizen power*, diperlukan perbaikan dalam struktur organisasi pengelola dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meski begitu, inisiatif swadaya warga telah menunjukkan adanya semangat kolektif dan kemandirian dalam pembangunan wisata lokal yang berkelanjutan.
2. Partisipasi aktif masyarakat RT 10/RW 02 Desa Batealit dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, masyarakat menjadi lebih terbuka, ramah, dan terlibat dalam musyawarah serta kegiatan gotong royong, yang memperkuat interaksi dan kebersamaan sosial. Secara ekonomi, muncul berbagai peluang usaha baru seperti pedagang makanan dan parkir. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya memperbaiki pengelolaan wisata, tetapi juga mendorong transformasi desa. Untuk keberlanjutan dampaknya, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar partisipasi berkembang ke arah pengelolaan yang lebih demokratis dan mandiri.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Batealit

Disarankan agar masyarakat Desa Batealit, khususnya warga RT 10/RW 02, terus meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam pengelolaan wisata Air Terjun Setatah. Tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan teknis seperti kerja bakti atau pembangunan fisik, namun juga lebih aktif dalam proses perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan wisata. Untuk itu, perlu dibangun struktur organisasi wisata yang lebih demokratis dan inklusif, agar semua warga memiliki ruang yang setara dalam menyuarakan pendapat dan mengelola sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa serta pemangku kepentingan terkait perlu memberikan dukungan nyata terhadap inisiatif warga dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan manajemen wisata, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, bantuan promosi, serta pendampingan dalam membentuk sistem administrasi yang transparan. Selain itu, penting juga dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan tetap berpijak pada kearifan lokal, sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informan, jangkauan wilayah, dan kedalaman analisis pada aspek kelembagaan serta peran aktor luar desa. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang, termasuk pihak pemerintah desa, dinas pariwisata, dan pengunjung wisata. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan komparatif antar desa wisata atau menggunakan perspektif teori yang berbeda, seperti teori tata kelola partisipatif atau pemberdayaan masyarakat, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, I. R. 2007. *Intervensi Komunitas: Pengelolaan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agama, R. K. 2012. *Al-qur'an dan Terjemahannya: Tafsir Al-Muyassar. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*
- Anggito, A. dan J. Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arifin, A. dan A. Rofiq. 2022. *Islam dan Rekonstruksi Sosial: Menafsir Ulang Konsep 'Ashabiyah dalam Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Danim, S. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka.
- Juliantara. 2002. *Partisipasi dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Maryati, K. dan J. Suryawati. 2006. *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII Jilid 3*. Jakarta: ESIS.
- Prasetya, H. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat, A. 2021. *Ekologi Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata*. Bandung: Aditya Media.
- Ratna, N. K. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso dalam Kurniawan, D. A. 2015. *Manajemen Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sumarto, H. S. 2005. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suwantoro, G. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widyaningsih, A. B. 2021. *Kesesuaian Pengelolaan Kawasan Wisata di Lereng Pegunungan Terhadap Konsep Community Based Tourism (Kawasan Wisata Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

JURNAL

- Angelina, P. dan E. Rachmawati. 2022. Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat di Community-Based Tourism Development in the Lawe Gurah Tourism Area, Gunung Leuser National Park. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. 16(1):15–32.
- Arifin, S. dan A. Rofiq. 2022. Strategi Pengelolaan Masyarakat Islam dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Desa.”. *AT-TAMKIN: Jurnal Pengelolaan Masyarakat Islam*. 1(2):63–77.
- Arnstein, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*. 35(4):216–224.
- Azizah, N. dan D. Rahayu. 2023. Dimensi Kualitas Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 12(1):91–102.
- Cahya, A. T., Y. Abdillah, dan L. Hakim. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Atraksi Wisata Air Terjun Kampunganyar, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*. 42(1):156–161.
- Fahira, N. S., R. Umar, dan M. M. Habibi. 2022. Peran Pemerintah Desa Purworejo dalam Pengelolaan Wisata Alam Sumber Complang Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*. 2(3):291–303.
- Febrianti, S. dan D. Suwondo. 2022. Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*. 10(1):44–56.
- Fitriani, R. 2022. Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Desa Wisata: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 10(2):67–79.
- Ginting, G., I. J. Dewi, I. Maesaroh, dan M. Maria. 2023. Development Concept and Strategy for Creative Tourism of Community - Based Tourism Destinations in Yogyakarta. *Ilomata International Journal of Management*. 4(1):58–72.
- Haris, A., P. Lestari, dan Y. Arifin. 2021. Partisipasi Simbolik dalam Pengelolaan Desa Wisata: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*. 7(2):79–88.
- Haryanto, A. dan R. Saputra. 2021. Revitalisasi Gotong Royong dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(2):89–98.
- Hidayat, T. dan A. Purwanto. 2021. Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 37(1):73–86.
- Ira, H. dan S. Muhammad. 2020. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*. 9(1):45–55.

- Lestari, D. P. dan H. Santoso. 2018. Pelibatan Pedagang Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pariwisata Pesona*. 4(2):89–98.
- Lestari, N. dan D. Nugroho. 2022. Kepemimpinan Lokal dan Inklusivitas Partisipasi dalam Pengelolaan Wisata Desa. *Jurnal Komunitas*. 14(1):23–24.
- Mangiri, D., H. Siregar, dan E. Rustiadi. 2020. Dampak Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Wisata Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 4(1):31–42.
- Mustanir, A. dan P. Abadi. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*. 5(2):247–261.
- Nabila, T. dan J. Purwohandoyo. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Tirtasari Sonsang Kabupaten Agam. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*. 16(1)
- Nugroho, H. dan S. Wulandari. 2020. Peran Pelaku Usaha Mikro dalam Mendukung Pelayanan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 6(3):145–154.
- Nurhayati, L. dan A. Zainuddin. 2017. Peran Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan di Kawasan Wisata Alam. *Jurnal Pariwisata Pesona*. 2(1):45–54.
- Prasetyo, B. dan R. Hidayat. 2019. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 12(1):45–54.
- Putra, A. S. dan R. A. Dewi. 2020. Keterlibatan Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Wisata: Studi Kasus di Desa Wisata Selo. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 6(1):33–42.
- Putri, A. N. dan B. Santoso. 2018. Kesenjangan Sosial dalam Pengelolaan Desa Wisata: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kajian Sosial*. 9(3):120–130.
- Rahmat, S. 2009. Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*. 5(9):1–8.
- Rahmawati, F. dan A. Firmansyah. 2019. Inisiatif Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Wisata Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1):57–64.
- Rahmawati, N. dan Y. Nugroho. 2019. Modal Sosial dan Keberlanjutan Desa Wisata: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 14(1):45–60.
- Rosaliza. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*. 11(2):71–79.
- Sari, D. P. dan A. Wibowo. 2020. Pendidikan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 8(1):23–32.

- Susanto, H. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Jurnal Manajemen dan Pariwisata*. 4(2):112–124.
- Sutopo, W. dan F. Ambarwati. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 24(2):185–197.
- Ulum, M. dan R. Suryani. 2021. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi dalam Program Pariwisata Desa. *Jurnal Pengelolaan Wilayah*. 14(2):113–123.
- Wibowo, M. S. dan L. A. Bella. 2023. Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*. 6(1):25–32.
- Wijayanti, A., D. P. Sari, dan N. Rahmawati. 2020. Gotong Royong Sebagai Modal Sosial dalam Pengelolaan Pariwisata Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5(2):101–110.
- Yuliani, M. 2019. Kekuasaan Informal dan Tata Kelola Desa Wisata: Studi di Bali. *Jurnal Politik Lokal*. 7(1):50–62.

Internet

Batealit. 2024. <https://Batealit.Jepara.Go.Id/>

SKRIPSI

Putranto, N. S. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulya, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang*. Skripsi Universitas Airlangga Surabaya.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 1441/Un.10.6/D1/KM.05.01/06/2025	12 Juni 2025
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
Yth. Ali Asikin Kepala Desa Batealit Di tempat <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i> Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Air Terjun Statah di Desa Batealit Jepara" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Nama : Fiqkri Maulana Dwiyanto NIM : 1906026158 Semester : 12 (Dua Belas) Jurusan : Sosiologi Tempat/ Tgl lahir : Jepara, 21 Juni 2001 CP/e-mail : fiqkrimaulanadwiyanto@gmail.com Nama Ayah/ Ibu : Jamil/Siti Arofah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Taman Siswa RT 3/ RW 3, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>  Thoikhatul Khoir		
Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo		

2. Foto Kegiatan



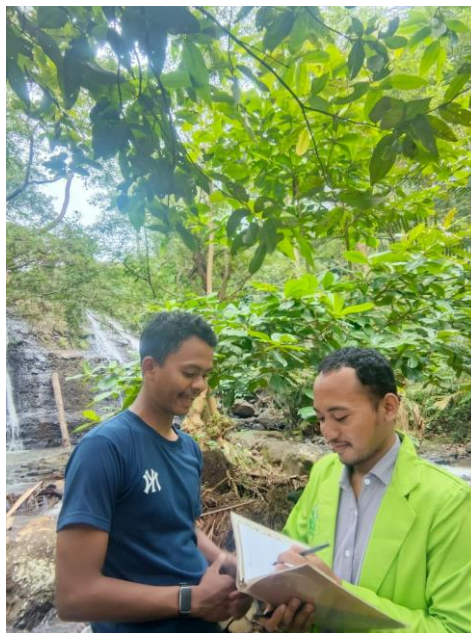
**Wawancara dengan Bpk Ali Asikin
selaku Kepala Desa Batealit**



**Wawancara dengan Bpk Ahmad Tukul
selaku Ketua RT 10/ RW 02 Desa Batealit**



**Foto dengan Ibu Badriah
selaku saudara dari Bpk Leman
sebagai Pengelola Wisata Air Terjun Setatah**



**Wawancara dengan Ahmad Faisal
selaku Pemuda Desa Batealit, Ikut aktif pengelolaan air terjun Setatah**



**Wawancara dengan Shofiatun
Selaku Pedagang Makanan di Air Terjun Setatah**



Kegiatan Perkumpulan RT membahas diskusi, rapat, evaluasi



Kegiatan diskusi, rapat, dan evaluasi



Gotong Royong memperluas jalan



Gotong Royong membersihkan lingkungan



Gotong Royong Pemuda Desa



Gotong Royong Pemuda Desa



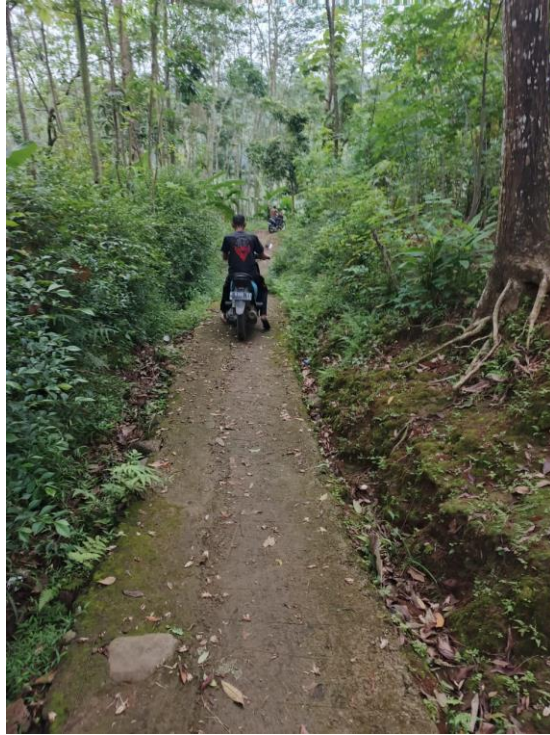
Pencatatan Kas RT Desa Batealit



Toilet Pengunjung Air Terjun Setatah



Papan Arah Jalur Air Terjun Setatah



Jalan untuk para pengendara motor dan pejalan kaki



Suasana pemandangan sekitar air terjun Setatah



Pengunjung objek wisata air terjun Setatah



Kondisi objek wisata air terjun Setatah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fiqkri Maulana Dwiyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Taman Siswa RT03/RW03 Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara
Nomer Telepon : 082244415794
Email : fiqkrimaulanadwiyanto@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Masalikil Huda 01 Tahunan : 2007-2013
2. MTs Negeri Pencangaan Di Bawu 01 Jepara : 2013-2016
3. SMA Negeri 1 Tahunan : 2016-2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 Juni 2025



Fiqkri Maulana Dwiyanto

NIM: 1906026158